


Laporan **KINERJA** **2023**

BPMP

PROVINSI SUMATERA UTARA

BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA
JL BUNGA RAYA NO 96 KOTA MEDAN

 061-8222372

 bmpprovsumut

 bpmpprovsumut.kemdikbud.go.id

NILAI SAKIP BPMP

PROVINSI SUMATERA UTARA

2019-2023

NILAI



2019

68,88

2020

70,13

2021

76,61

2022

78,05

2023

85,05

TAHUN

KATA PENGANTAR



Drs. Irwan Safii, M.Pd

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan Rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap

instansi pemerintah untuk Menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023 menetapkan dua sasaran dan empat indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam perencanaan kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja ke depannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2023.

Medan, 27 Januari 2024
Plt. Kepala,



Drs. Irwan Safii, M.Pd
NIP. 196512311992031014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR BAGAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	4
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	4
D. Isu-isu Straregis dan Peran Strategis Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Perencanaan Kinerja	8
B. Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. Capaian Kinerja	12
B. Realisasi Anggaran	47
C. Inovasi, Penghargaan dan Program <i>Cross cutting/Collaborative</i>	48
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	2
Tabel 1.2 Data SDM PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	4
Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022-2024	10
Tabel 2.2 Revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	12
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	13
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2	15
Tabel 3.4 Sebaran Jumlah Sekolah Sesuai Tipe IKM yang Dipilih	22
Tabel 3.5 Status Aktivasi Akun Belajar per 2 Oktober 2023	23
Tabel 3.6 Akses Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	32
Tabel 3.7 Daerah dengan Kategori Capaian SPM di Sumatera Utara tahun 2023	34
Tabel 3.8 Capaian Masuknya Indikator SPM dalam Perencanaan Daerah	35
Tabel 3.9 Capaian Objective Subkegiatan Prioritas Per Provinsi	36
Tabel 3.10 Capaian Objective Subkegiatan Prioritas Per Kabupaten/Kota	36
Tabel 3.11 Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka	37
Tabel 3.12 Rekapitulasi Program Guru Penggerak Per Wilayah	38
Tabel 3.13 Rekapitulasi Asesmen Nasional Per Wilayah	38
Tabel 3.14 Rekapitulasi Transformasi Pendidikan Khusus	38
Tabel 3.15 Regulasi daerah yang diterbitkan sebagai dukungan terhadap Merdeka Belajar.....	41
Tabel 3.16 Peraturan Daerah yang telah diterbitkan	41
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1	45
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Anggaran	46
Tabel 3.19 Target, Realisasi dan Capaian kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nomenklatur BPMP Provinsi Sumatera Utara	1
Gambar 1.2 Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara	4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara	6
Gambar 3.1 Komitmen Daerah	37
Gambar 3.2 Capain IKK 2.2	47
Gambar 3.3 Inovasi Pelaksanaan Advokasi	49
Gambar 3.4 Penghargaan BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	50

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pendidikan	3
Grafik 1.2 Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Golongan	3
Grafik 1.3 Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jenis Kelamin	3
Grafik 3.1 Jumlah sekolah PSP di Sumatera Utara berdasar angkatan dan jenjang	17
Grafik 3.2 Sebaran Jumlah Sekolah Penggerak Tiap Kab/Kota	17
Grafik 3.3 Perbandingan Jumlah Sekolah PSP dan IKM tiap daerah	18
Grafik 3.4 Pelaksana IKM	21
Grafik 3.5 Pemanfaatan PMM	24
Grafik 3.6 Data Progres Aksi Nyata	25
Grafik 3.7 Capaian Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) per 5 Desember 2022..26	
Grafik 3.8 Perkembangan <i>Adoption Rate</i> PMM unuk Penyelesaian Topik tiap Daerah	27
Grafik 3.9 Chart Monitoring Progress (Matriks Level 2 – Progres Belajar)	27
Grafik 3.10 Perkembangan Jumlah Isu yang Dieskalasi di Daerah di Sumatera Utara Per Minggu	29
Grafik 3.11 Pengelompokan Isu yang Dieskalasi di Daerah di Sumatera Utara	30
Grafik 3.12 Data Akses Rapor Pendidikan	33
Grafik 3.13 Data Guru Penggerak Perangkatan dan Perjenjang	43
Grafik 3.14 Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	45
Grafik 3.15 Capaian Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara	47
Grafik 3.16 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023	48
Grafik 4.1 Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Tujuan Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan

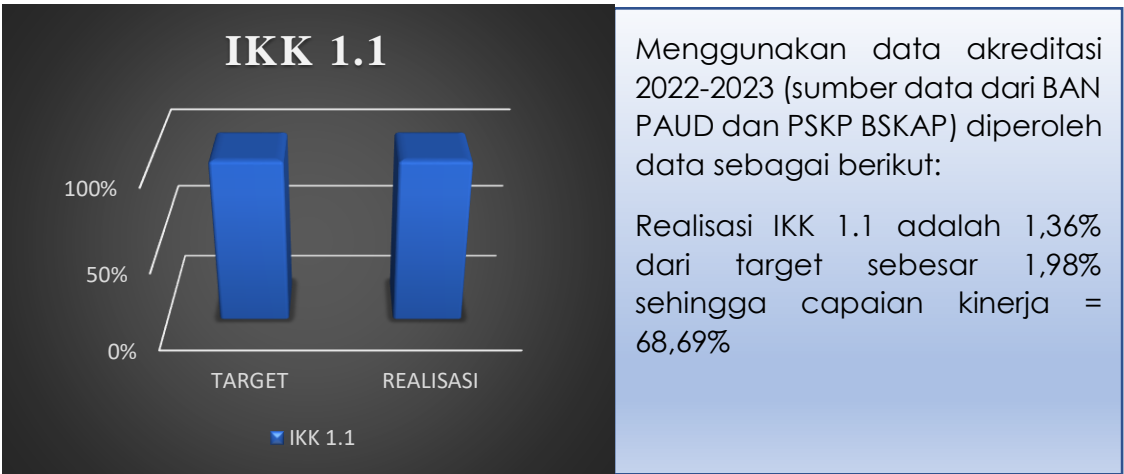
2020-2024	11
-----------------	----

Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

IKK 1.1. Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya



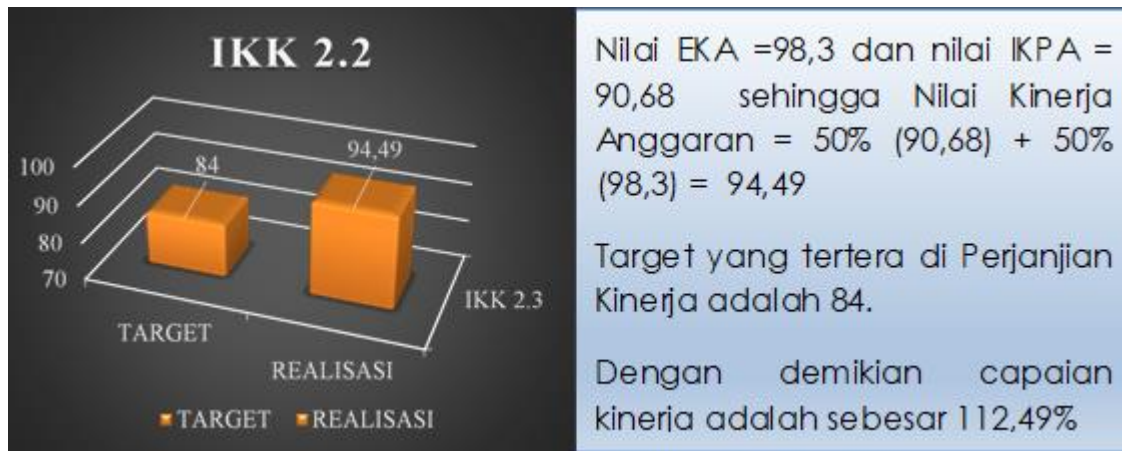
IKK 1.2. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)



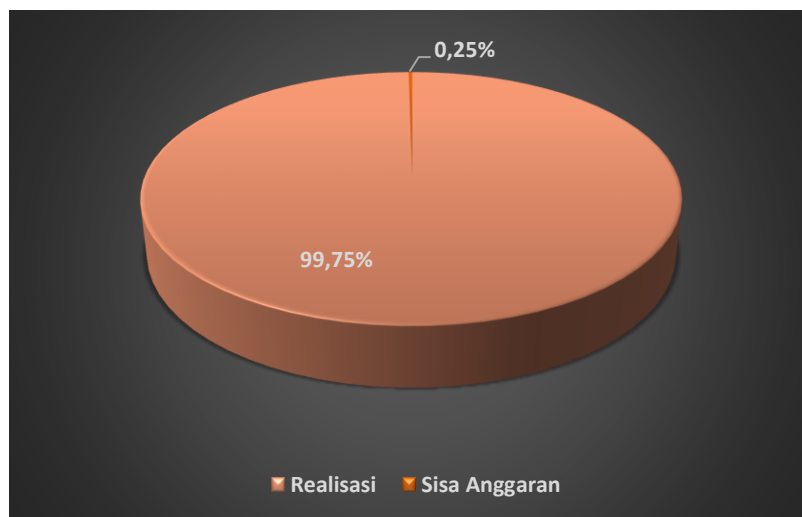
IKK 2.1. Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023	
Target	A
Realisasi	A
Dengan Interpretasi	Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja.

IKK. 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L



Realisasi Anggaran



Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serap	Daya Serap
Rp 48.375.152.000,-	Rp 48.254.503.464,-	99,75%	

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

- 1 Sosialisasi Program Prioritas Kemendikbud belum menjangkau ke seluruh satuan pendidikan.
- 2 Kemampuan staf BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan;
- 3 Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar belum optimal dilihat dari progress capaian yang diperoleh dari dashboard seperti rapor pendidikan, belajar.id dan pemanfaatan PMM;
- 4 Masih terdapat dukungan yang belum optimal dari Pemerintah Daerah terhadap Kebijakan Merdeka Belajar;
- 5 Beragamnya tingkat pemahaman SDM pada Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Kebijakan Merdeka Belajar di daerahnya masing-masing.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Sosialisasi Program Prioritas Kemendikbud melalui Rapat Koordinasi ke berbagai Stakeholder, antara lain : Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan, Mitra Pembangunan dan Lembaga Asosiasi Profesi seperti IGTKI dan HIMPAUDI;
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui rapat rutin (internalisasi), *In House Training*, dan pembekalan penyamaan persepsi sebelum pelaksanaan kegiatan;
3. Advokasi Perencanaan Berbasis Data, Pemanfaatan PMM dan aktivasi akun belajar.id ke Satuan Pendidikan;
4. Advokasi melalui PMO ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setiap bulan;
5. Pelibatan semua bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada pelaksanaan Advokasi melalui PMO.

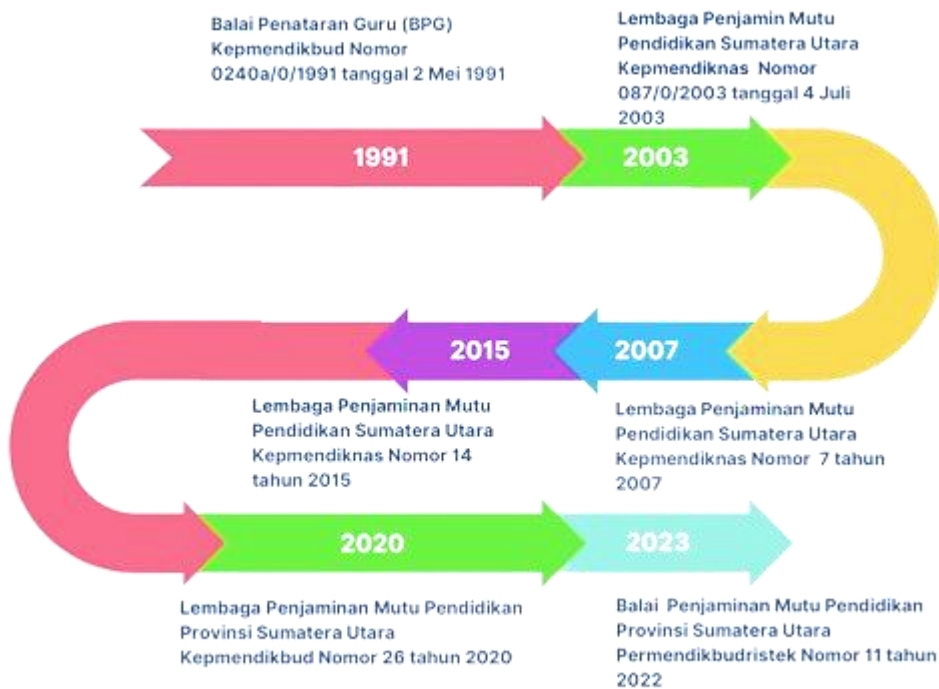
BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Sejak April 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Drs. Irwan Safii, M.Pd.

LINIMASA PERUBAHAN NAMA LEMBAGA



Gambar 1.1 Nomenklatur BPMP Provinsi Sumatera Utara



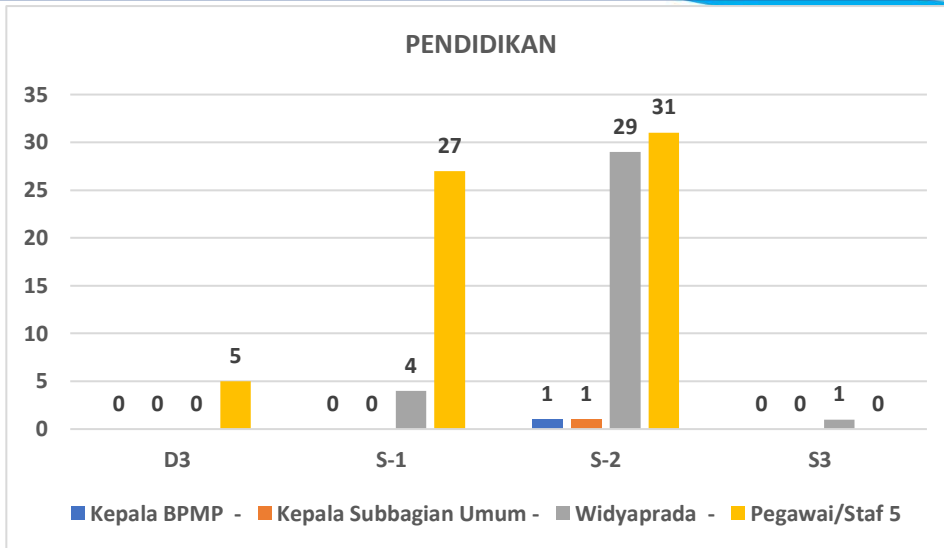
Gambaran SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara

BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2023, mempunyai pegawai sebanyak 157 orang yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional Widyapraja, jabatan fungsional umum dan PPNPN.

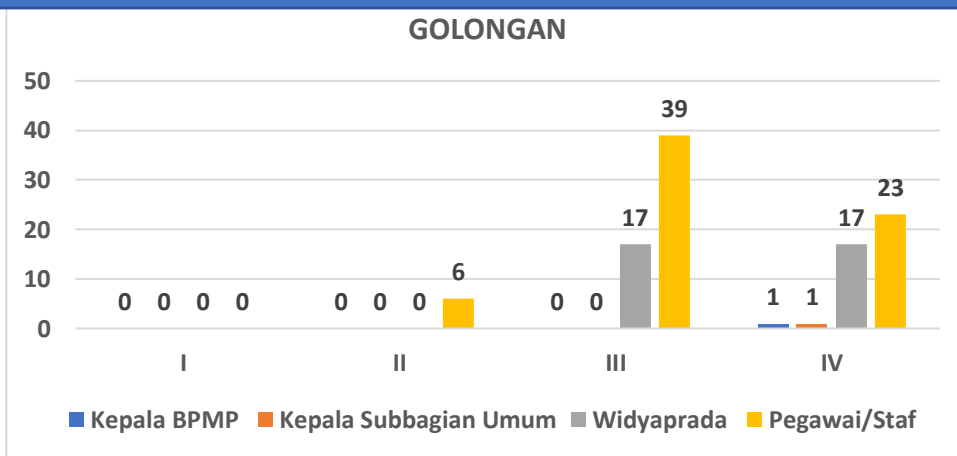
Tabel 1.1.
Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

No.	Uraian	Pendidikan				Golongan				Kelamin		Jumlah	
		D3	S-1	S-2	S3	I	II	III	IV	LK	PR		
1	Kepala BPMP	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	
2	Kepala Subbagian Umum	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	
3	Widyapraja	-	-	4	29	1	-	-	17	17	15	19	34
4	Pegawai/Staf	5	5	27	31	-	-	6	39	23	35	33	68
Jumlah Keseluruhan Pegawai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023:												104	

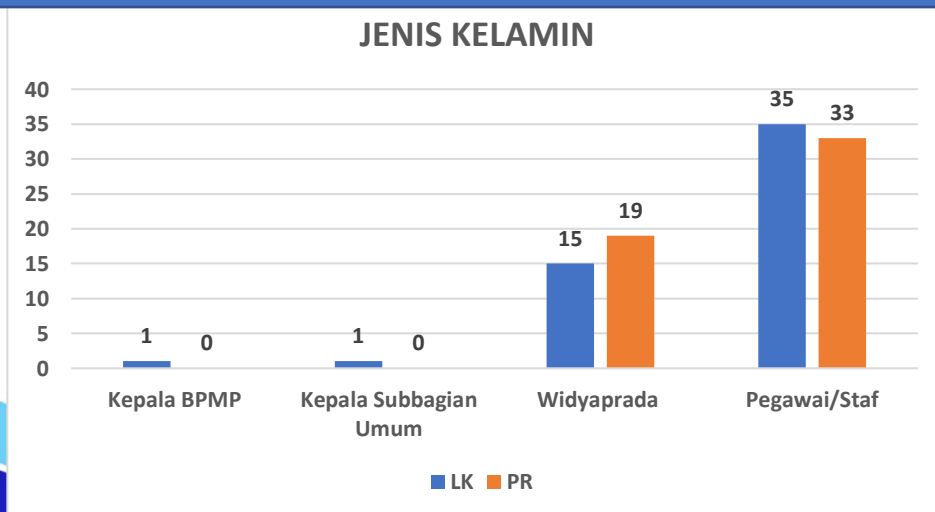
Grafik 1.1 Grafik Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Pendidikan



Grafik 1.2 Grafik Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Golongan



Grafik 1.3 Grafik Data SDM BPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Jenis Kelamin



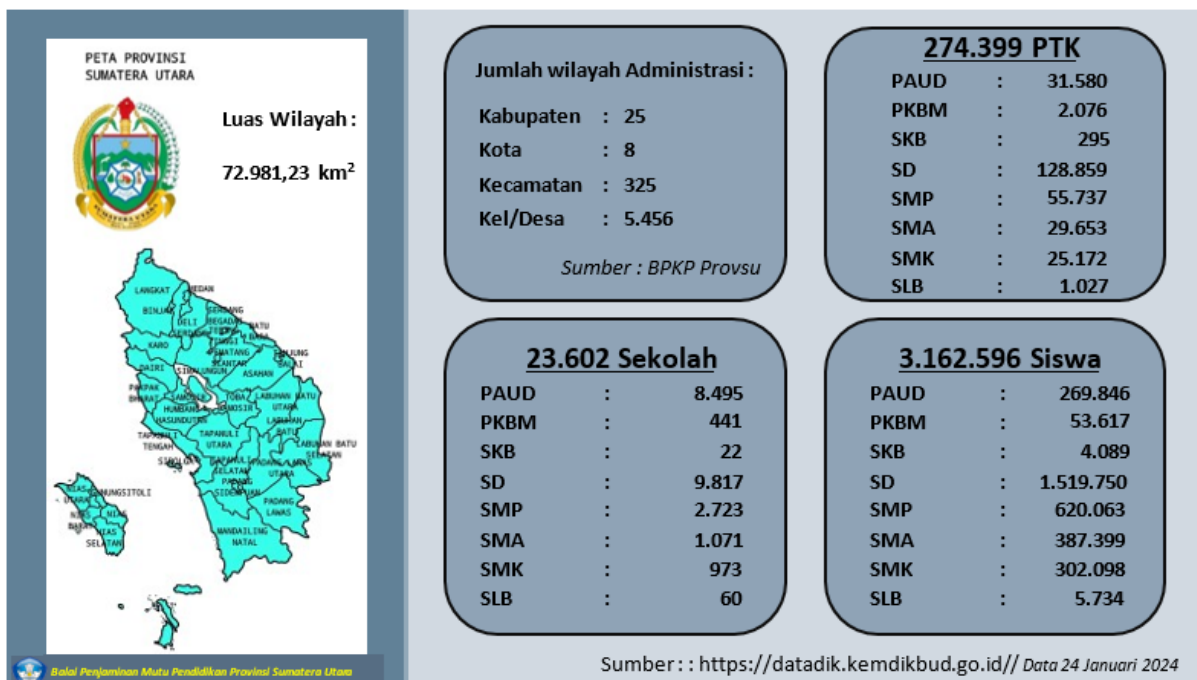


Tabel 1.2.
Data SDM PPNPN BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2023

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	PPNPN Pramubakti	5	9	14
2	PPNPN Keamanan	18	2	20
3	PPNPN Kebersihan	29	7	36
4	PPNPN Pengemudi	3	0	3
	Jumlah	55	18	73

Sumber data : Kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Utara

Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara



Gambar 1.2. Beban Kerja BPMP Provinsi Sumatera Utara

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PermenPAN dan RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
7. Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
9. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi



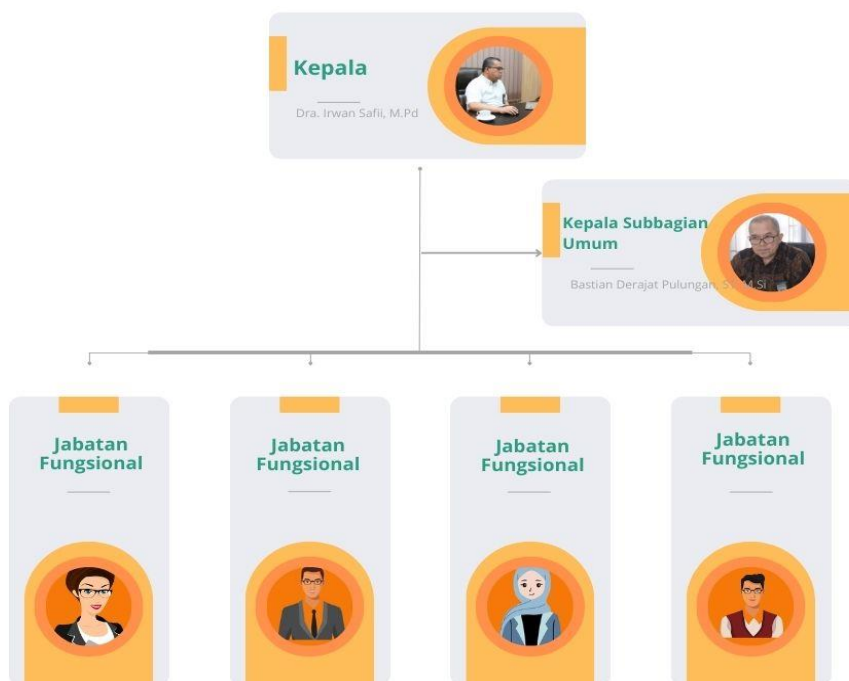
TUGAS BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pendidikan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

FUNGSI BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
3. Pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat ;
6. Pengembangan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat;
7. Pelaksanaan urusan administrasi

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1.3. Struktur Organisasi BPMP Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022.

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Permasalahan/Isu-isu Strategis

- a. Optimalisasi Peningkatan hasil belajar (dimensi A) dan peningkatan Skor Rapor Pendidikan (Dimensi D dan E) pada satuan pendidikan pelaksana PSP;
- b. Optimalisasi pengimbasan oleh satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan I kepada satuan pendidikan lainnya;
- c. Optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) di Satuan Pendidikan;
- d. Optimalisasi pemanfaatan SIPLAH dan ARKAS oleh satuan pendidikan penerima BOSP.
- e. Optimalisasi pemanfaatan chromebook dan akun belajar.id
- f. Optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Optimalisasi pemanfaatan rapor pendidikan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Sekolah (ARKAS);
- h. Optimalisasi Peningkatan kompetensi SDM internal melalui coaching, mentoring, dan aktivitas komunitas belajar;
- i. Optimalisasi pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah;
- j. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sesuai dengan prinsip objektif, transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi peran Satgas dan tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan Pendidikan;
- l. Peningkatan pemahaman *stakeholder* daerah dan satuan pendidikan terhadap urgensi kebijakan Asesmen Nasional dan sulingjar;
- m. Aksi nyata penguatan pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas 1 dan 2 pada awal tahun ajaran baru;
- n. Aksi nyata penguatan pembelajaran pada satuan PAUD dan SD kelas 1 dan 2 untuk pencapaian kemampuan fondasi;
- o. Pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi dan numerasi;
- p. Implementasi Gerakan sekolah sehat secara berkelanjutan;
- q. Pendidikan berjenjang bidang Pendidikan Inklusif bagi guru;
- r. Pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) oleh Pemerintah Daerah;
- s. Pemerintah Daerah memiliki peningkatan Indeks kualitas dapodik.

2. Peran Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara

BPMP Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikbudristek, mempunyai peran strategis dalam melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan antara lain :

1. Menyukseskan Program Sekolah Penggerak dengan cara mendorong Pemerintah Daerah menerbitkan regulasi untuk mendukung Program Sekolah Penggerak dalam bentuk :
 - a. Peraturan Kepala Daerah;

- b. Surat Edaran Kepala Dinas;
 - c. Alokasi anggaran;
2. Mempercepat implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten/Kota melalui advokasi ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi agar mendorong Satuan Pendidikan :
 - a. Mendaftar sebagai pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka secara mandiri;
 - b. Memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar;
 - c. Membentuk Komunitas Belajar;
 - d. Berbagi praktik baik;
 3. Optimalisasi pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) melalui fasilitasi dan penguatan strategi pengimbasan serta berbagi praktik baik di PMM;
 4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menggunakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dengan melakukan advokasi ke Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
 - a. Berpartisipasi dalam musrenbang Kabupaten/Kota/Provinsi;
 - b. Pendampingan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi;
 5. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) menggunakan PBD dengan melakukan Bimbingan Teknis ke Satuan Pendidikan;
 6. Penuntasan berbagai permasalahan pendidikan melalui pertemuan yang dilakukan secara periodik dalam bentuk kegiatan Pokja Manajemen Operasional (PMO) dan;
 7. Verifikasi dan validasi kesiapan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Satuan Pendidikan untuk pelaksanaan ANBK.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

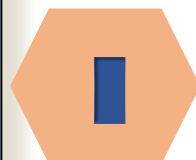
Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, revisi 22 Januari 2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebhinekaan global.

BPMP Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi sesuai Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- b. Melakukan pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- c. Melaksanakan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- d. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
- e. Melakukan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi



Rencana Kinerja Jangka Menengah:

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja
BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			Satuan	2020-2021*	2022	2023	2024
1	Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	-	0,98	1,98	3,92
		1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	-	25	30	35
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen BPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	Predikat	-	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	Nilai	-	83	84	85

* Tahun 2020 dan 2021 pengukuran kinerja masih menggunakan Rapor Mutu Pendidikan sedangkan tahun 2022 – 2024 pengukuran kinerja menggunakan Rapor Pendidikan.

BPMP Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.

Bagan 2.1

Tujuan Strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara Periode Perencanaan 2020-2024

TUJUAN STRATEGIS 1		INDIKATOR KINERJA	
Meningkatnya mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Utara.	TUJUAN	TARGET 2024	
	1.Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya.	3,92%	
	2.Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen).	35%	

TUJUAN STRATEGIS 2		INDIKATOR KINERJA	
Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara yang berkualitas.	TUJUAN	TARGET 2024	
	1.Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.	A	
	2.Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.	85	

BPMP PROVINSI SUMATERA

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran yang akan dicapai pada setiap tahunnya.

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 mengalami revisi atau perubahan sebanyak dua kali sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Revisi Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

No.	Perjanjian Kinerja	Tanggal Terbit	Rincian Revisi PK
1.	Perjanjian Kinerja awal	30 Januari 2023	Perjanjian Kinerja awal dengan Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen.
2.	Perjanjian Kinerja revisi ke-1	18 Desember 2023	Perubahan alokasi anggaran yang semula Rp. 48.927.969.000,- menjadi Rp. 48.375.152.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menetapkan dua sasaran dengan empat indikator kinerja dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,98%	1,36%	68,69%
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30%	52,94%	176,47%
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	A	A	-
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	84	94,49	112,49

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen belum sepenuhnya dapat dilakukan perhitungan berdasarkan rapor pendidikan. Hal ini disebabkan data hasil Asesmen Nasional (AN) dan Survey Lingkungan Belajar Tahun 2023 belum tersedia untuk jenjang PAUD, sehingga dipergunakan data akreditasi tahun 2022-2023 dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP dimana hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:

persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya mencapai 1,36% dari target sebesar 1,98%.

Untuk jenjang Dikdas dan Dikmen menggunakan data rapor pendidikan 2022 dibandingkan dengan rapor pendidikan 2021, hasil perhitungan diperoleh data sebagai berikut:

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) mencapai 52,94% dari target sebesar 30%.

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Definisi :

Persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing-masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar.

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas yang rapor pendidikan atau survey lingkungan belajar meningkat}}{\text{Jumlah Satuan PAUD dan Dikmas pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1

Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
-	1,98	1,36	68,69	2,13	63,85%	3,92	34,69%

Pengukuran IKK 1.1 menggunakan data akreditasi 2022-2023 (sumber data dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP). Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, realisasi sebesar 1,36%, sementara target yang ditetapkan adalah sebesar 1,98%. Dengan demikian capaian kinerja = 68,69%

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Definisi :

Persentase dari provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing-masing yang memiliki rapor pendidikan lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya.

Metode Penghitungan:

$$= \frac{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen yang rapor pendidikannya meningkat}}{\text{Jumlah Satuan Dikdas dan Dikmen pada Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan}} \times 100\%$$

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2

Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
97,1	30	52,94	176,47%	67,74	78,15%	35	151,26%

Pengukuran IKK 1.2 menggunakan data rapor pendidikan 2022 dibandingkan dengan rapor pendidikan 2021. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh tim Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, ada sebanyak 18 kabupaten/kota/provinsi dari sejumlah 34 kabupaten/kota/provinsi yang meningkat nilai Rapor Pendidikannya di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan demikian terdapat 52,94% kabupaten/kota/provinsi yang meningkat Rapor Pendidikannya.

Program dan Kegiatan Pendukung

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 1.1 dan IKK 1.2 ini antara lain:

1. Program Sekolah Penggerak (PSP).

Program Sekolah Penggerak (PSP) adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).

Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak.

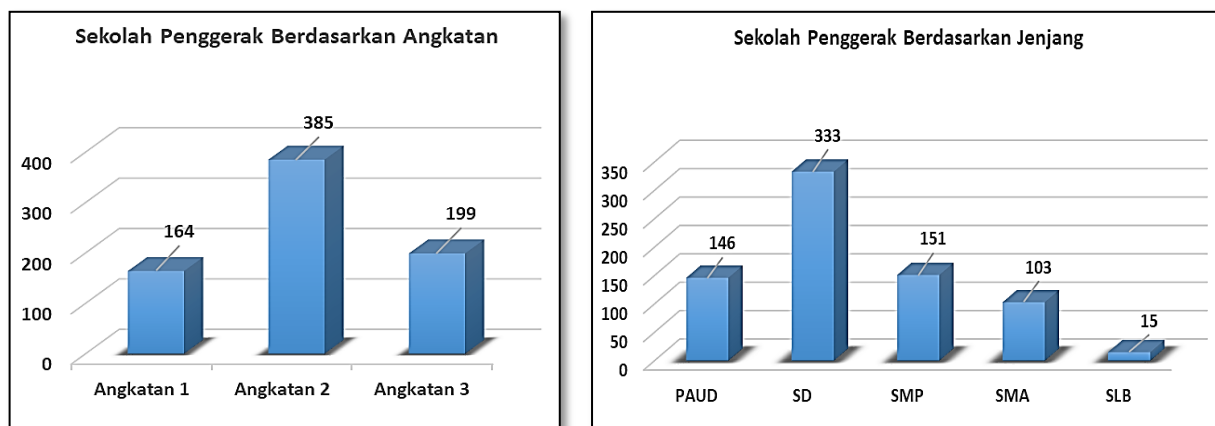
Di Sumatera Utara telah dipilih 748 sekolah PSP dari 3 angkatan yang tersebar di 33 kab/kota. Angkatan-1 sebanyak 164 sekolah (22%), angkatan-2 sebanyak 385 sekolah (51%) dan angkatan-3 sebanyak 199 sekolah (27%). Pada akhir tahun 2022 Angkatan- 3 dalam tahap proses penetapan dan pengurusan administrasi, dan di awal tahun 2023 programnya mulai berjalan.

Sebanyak 6 kabupaten/kota menjadi peserta program PSP-1 yaitu Kota Medan, Karo, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara dan Asahan. Daerah ini menjadi pionir implementasi kurikulum merdeka di tingkat sekolah. Desain program PSP ini dikendalikan langsung dari pusat, dimana urusan kendali di daerah menjadi tanggungjawab BPMP, dan kendali di tingkat sekolah dibawah tanggung jawab Balai Besar Guru Penggerak (BBGP). Koordinasi di daerah menjadi kunci bertemuanya semua pihak yang terlibat di sini.

Ada 5 intervensi yang dilakukan untuk PSP yaitu:

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris
2. Penguatan SDM sekolah
3. Pembelajaran paradigma baru
4. Perencanaan berbasis data
5. Digitalisasi sekolah

Grafik 3.1 Jumlah sekolah PSP di Sumatera Utara berdasar angkatan dan jenjang

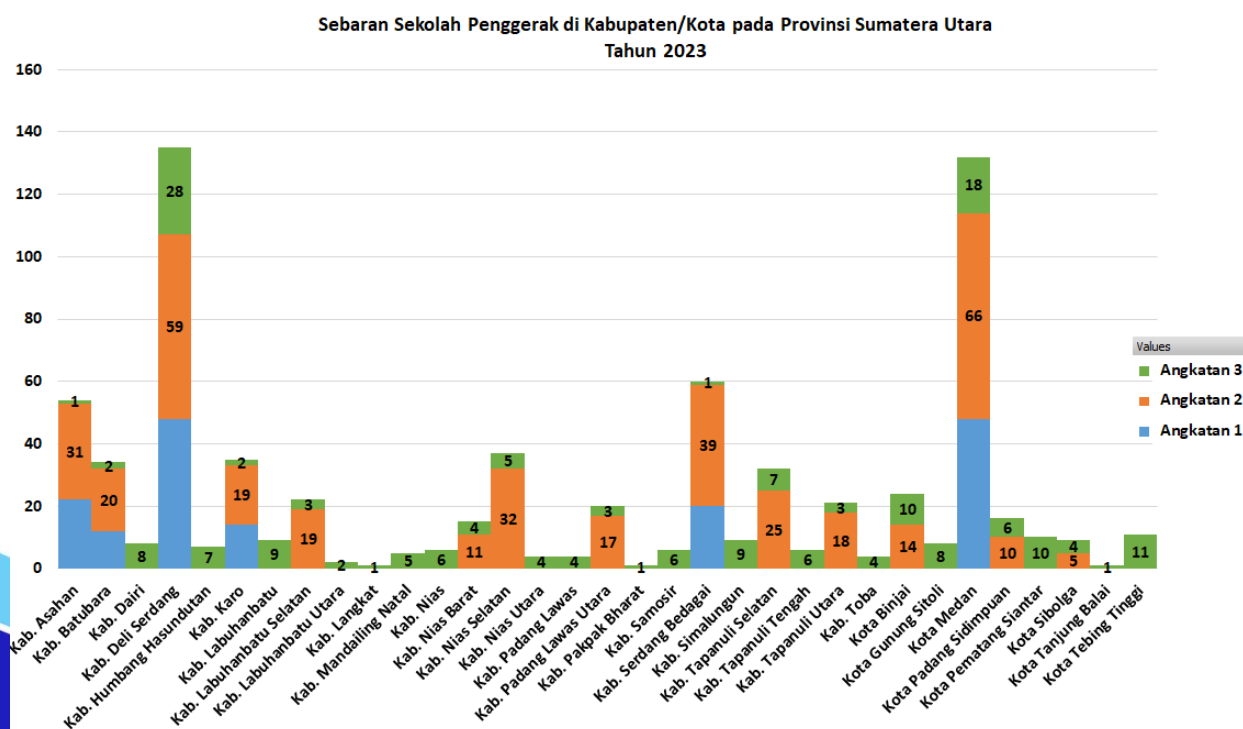


Sumber Data <https://psp-web.pauddikdasmen.kemdikbud.go.id/> per tanggal 27 Sept 2023

Berdasar jenjang, sekolah PSP terbanyak di jenjang SD (333 sekolah, disusul jenjang SMP 151 sekolah, PAUD 146 sekolah, SMA/SMK 103 sekolah dan SLB 15 sekolah sehingga total Sekolah Penggerak di Provinsi Sumatera Utara saat ini berjumlah **748 sekolah** dengan sebaran 164 sekolah PSP Angkatan 1, 385 sekolah PSP Angkatan 2 dan 199 sekolah PSP Angkatan 3.

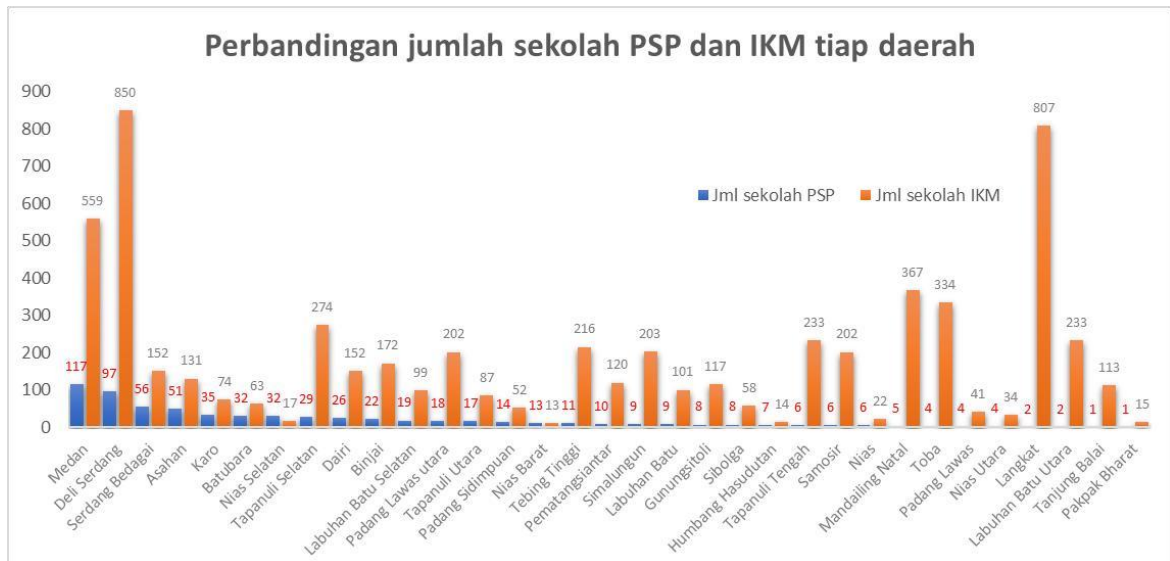
Berdasarkan sebarannya antar daerah, jumlah sekolah PSP terbanyak di Kota Medan 132 sekolah (17,64% dari total SP), disusul Deli Serdang 97 sekolah (12,96% dari total SP) dan Serdang Bedagai 60 unit (8,02% dari total SP).

Grafik 3.2 Sebaran Sekolah Penggerak Tiap Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara



Jumlah sekolah PSP diseleksi berdasar kemampuannya dalam menjalankan program ketika proses seleksi, dan besar kecilnya tidak tergantung jumlah sekolah di daerah.

Grafik 3.3 Grafik Perbandingan Jumlah Sekolah PSP dan IKM tiap daerah



Dari grafik di atas terlihat bahwa jumlah sekolah IKM yang besar tidak kemudian membuat jumlah sekolah PSP menjadi besar. Untuk mendapatkan jumlah sekolah PSP yang besar membutuhkan upaya lebih karena seleksinya cukup ketat, khususnya terkait mindset dan kompetensi kepala sekolahnya. Daerah atau satuan pendidikan perlu menyiapkan diri untuk itu. Sayangnya ini tidak terjadi di beberapa daerah, dimana jumlah sekolah IKM besar (keinginan untuk menerapkan kurikulum merdeka tinggi) tapi karena penyiapan tidak mencukupi (atau malah tidak disiapkan sama sekali) sehingga jumlah sekolah PSP sangat kecil. Ini juga dipengaruhi kuota yang diberikan pusat untuk setiap daerah.

Daerah di grafik di posisi sebelah kanan menunjukkan ketidaksiapan menyiapkan diri mengikuti seleksi sekolah PSP. Akibatnya mereka tidak atau kurang memiliki model sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka, yang bisa menjadi contoh atau model sekolah lain yang menjadi peserta IKM. Kabupaten tersebut diantaranya adalah: Langkat, Labuhanbatu, Toba, Mandailing Natal. Langkat misalnya dengan jumlah sekolah IKM 807 unit, namun hanya memiliki 2 sekolah PSP (bahkan informasi terakhir tinggal 1), itupun di angkatan-3. Hal ini akan menyebabkan Langkat kesulitan dalam sosialisasi di sekolah IKM karena tidak memiliki model sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dengan baik. Hal ini juga berlaku untuk 17 kabupaten/kota peserta PSP angkatan-3 di Sumatera Utara.

3.1.1 Capaian BPMP Sumatera Utara terkait PSP

Perjalanan Program Sekolah Penggerak masuk tahun dan angkatan ketiga. Berberapacapaian BPMP Sumatera Utara yang telah dicatat Pokja-2 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di Provinsi Sumatera Utara khususnya Jenjang SMA dan SLB.
- b. Sebanyak 33 Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari 25 Bupati dan 8 Walikota se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing- masing khususnya jenjang PAUD, SD dan SMP.
- c. Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi se Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Sekolah Penggerak dengan Mendikbudristek untuk mengimplementasikan PSP di daerahnya masing-masing;
- d. Sebanyak 748 Kepala Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB telah terpilih melalui seleksi yang ketat dan Kepala SP Angkatan 1 dan Angkatan 2 telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Sekolah Penggerak.
- e. Sebanyak 748 Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah ditetapkan sebagai sasaran Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB.
- f. Sebanyak 34 Kepala Dinas Pendidikan Kabupten/Kota/Provinsi telah meng-SK kan Pokja Manajemen Office (PMO) dan telah melaksanakan pertemuan untuk membahas permasalahan dan solusi yang terjadi pada Sekolah Penggerak;
- g. Sebanyak 748 Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3 telah diangkat sebagai Kepala Sekolah Penggerak Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB telah mengimplementasikan kutikmpengerak;
- h. P5 di satuan pendidikan sasaran PSP A1, A2 dan A3 telah terlaksana dan mulai menampakkan hasilnya.
- i. Sekolah Penggerak di Provinsi Sumatera Utara telah menggunakan PMM dalam peningkatan kemampuan para gurunya dalam membelajarkan siswanya.
- j. Terjadi perubahan paradigma di kalangan satuan pendidikan untuk bisa menjadi Sekolah Penggerak dan menerapkan Kurikulum Merdeka pada Katagori Kurikulum mandiri berbagi.
- k. Sudah terjalin kerjasama dalam memberhasilkan PSP antar UPT Kemendikbudristek di

Provinsi Sumatera Utara.

3.1.2 Miskonsepsi Program Sekolah Penggerak

Dalam pelaksanaannya, telah terjadi kesalahan pendapat yang beredar atau miskonsepsi.

Hal ini mempengaruhi sekolah pada saat mendaftar atau pada saat pelaksanaan program.

Beberapa miskonsepsi tersebut antara lain:

- a. Hanya sekolah favorit yang boleh mendaftar di PSP;
- b. Performa sekolah hanya dilihat dari kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki;
- c. PSP itu adalah salah satu program yang dapat meningkatkan kesejahteraan (taraf ekonomi) guru;
- d. Digitalisasi sekolah adalah standar kualitas bagi PSP;
- e. *In House Training* dilakukan oleh Fasilitator Sekolah Penggerak;
- f. Pemenuhan sarana prasarana Program Sekolah Penggerak (PSP) sebagai salah satu bentuk intervensi PSP;
- g. Penentuan kelulusan sekolah penggerak harus disesuaikan dengan kinerja, SDM yang dimiliki, jumlah pendidik dan peserta didiknya, serta sarana dan prasarana yang dimiliki;
- h. Jika kepala sekolah tidak sanggup melaksanakan Program Sekolah Penggerak maka Kepala Sekolah tersebut akan dimutasi ke tempat lain oleh Dinas Pendidikan;
- i. Kebijakan penetapan kepala sekolah PSP mendapat intervensi dari pemerintah daerah;
- j. Dinas Pendidikan menganggap setelah PSP Angkatan 1 berakhir, maka PSP tidak dilanjutkan setelah tahun 2024;
- k. Dinas Pendidikan menganggap bahwa Kemendikbudristek melengkapi seluruh sarana dan prasarana di sekolah penggerak.

3.1.3 Kendala yang masih dihadapi

Dalam pelaksanaannya, program SP ini mengalami kendala, antara lain:

- a. Belum semua daerah yang mengalokasikan anggaran atau *sharing* dana untuk mendukung PSP di daerahnya
- b. Belum terlihat daerah yang memiliki program khusus secara berkesinambungan dalam perencanaannya untuk mewujudkan Program Sekolah Penggerak
- c. Belum terlihat adanya apresiasi pemerintah daerah kepada Sekolah Penggerak yang ada di daerahnya masing-masing
- d. Masih ada Kepala Daerah yang melakukan mutasi kepada Kepala Sekolah Penggerak yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana tertuang dalam Kepmendikbudristek Nomor 371/M/Tahun 2021 Tentang Program Sekolah Penggerak

- e. Belum terlihat persiapan Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Program Sekolah Penggerak setelah PSP Angkatan 1 berakhir.

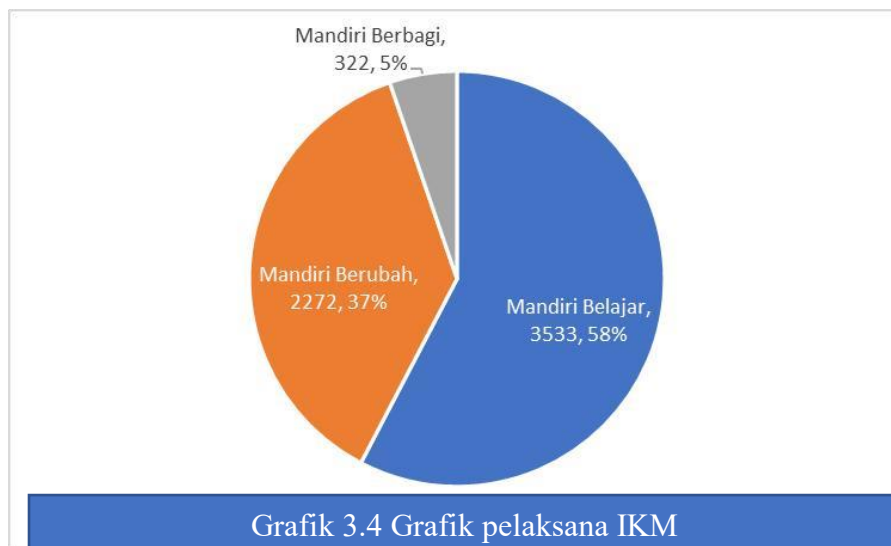
3.1 Implementasi Kurikulum Merdeka (PDM_02)

Dalam rangka pemulihan pembelajaran tahun 2022 - 2024, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan bahwa sekolah yang belum siap untuk menggunakan Kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan Kurikulum 2013 sebagai dasar pengelolaan pembelajaran. Kurikulum Darurat yang merupakan modifikasi dari Kurikulum 2013 masih dapat digunakan oleh satuan pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka sebagai opsi bagi satuan pendidikan yang di dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang siap melaksanakan Kurikulum Merdeka.

Tahun 2024 menjadi penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan Kemendikburistek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemulihan pembelajaran.

Sekolah diberi kebebasan mengimplementasikan kurikulum merdeka sesuai kemampuan dan kondisi sekolahnya. Saat ini ada 6.150 satuan pendidikan yang mendaftarkan diri menjadi pelaksana kurikulum merdeka di Sumatera Utara. Berikut data jumlah sekolah menurut kabupaten/kota sesuai pilihannya masing-masing.

Hingga akhir tahun 2022, ada 6.150 satuan pendidikan atau 28% dari total sekolah di Sumatera Utara mendaftarkan diri menjadi pelaksana IKM. Sebanyak 58% memilih tipe *Mandiri Belajar*, 37% memilih *Mandiri Berubah*, dan baru 5% yang memilih *Mandiri Berbagi*.



Mandiri Berbagi artinya sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka dan mengembangkan sendiri perangkat ajarnya serta bisa membagikannya ke sekolah lain. Sementara pada *Mandiri Belajar*, sekolah diberikan kebebasan saat menerapkan kurikulum merdeka beberapa

bagian saja. Sementara *Mandiri Berubah* meski menerapkan penuh kurikulum merdeka, namun perangkat ajarnya bisa menggunakan yang sudah ada di PMM.

Tabel 3.4 Sebaran jumlah sekolah sesuai tipe IKM yang dipilih

Jumlah SekolahKab_Kota	Tipe IKM				Grand Total
	Mandiri Belajar	Mandiri Berubah	Mandiri Berbagi	SP	
Kab. Deli Serdang	436	361	8	48	853
Kab. Langkat	444	359	9		812
Kota Medan	361	118	34	48	561
Kab. Mandailing Natal	301	58	8		367
Kab. Toba	296	29	10		335
Kab. Tapanuli Selatan	157	100	17		274
Kab. Tapanuli Tengah	211	21	2		234
Kab. Labuhan Batu Utara	84	142	7		233
Kota Tebing Tinggi	10	204	4		218
Kab. Simalungun	114	87	4		205
Kab. Samosir	41	161	1		203
Kab. Padang Lawas utara	182	19	1		202
Kota Binjai	84	72	17		173
Kab. Serdang Bedagai	13	117	2	20	152
Kab. Dairi	124	22	6		152
Kab. Asahan	75	30	4	22	131
Kota Pematangsiantar	90	30	4		124
Kota Gunungsitoli	80	36	1		117
Kota Tanjung Balai	36	76	1		113
Kab. Labuhan Batu	54	46	1		101
Kab. Labuhan Batu Selatan	79	20			99
Kab. Tapanuli Utara	64	19	4		87
Kab. Karo	14	45	1	14	74
Kab. Batubara	40	10	1	12	63
Kota Sibolga	14	43	1		58
Kota Padang Sidempuan	38	14	1		53
Kab. Padang Lawas	32	8	1		41
Kab. Nias Utara	16	14	4		34
Kab. Nias	14	8			22
Kab. Nias Selatan	10	5	2		17
Kab. Pakpak Bharat	14	1			15
Kab. Humbang Hasudutan	9	3	2		14
Kab. Nias Barat	11	2			13
Grand Total	3548	2280	158	164	6150

Sumberdata dashbord IKM. Jumlah PSP yang ditampilkan hanya di angkatan-1

3.2.1 Adoption Rate PMM

Dari 6.150 sekolah yang menjadi pelaksana IKM, maka sebagian dari intervensi digital sekolah, guru-gurunya diwajibkan menggunakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) untuk pembelajaran. Platform Merdeka Mengajar merupakan sarana digital yang disediakan Kemendikbudristek RI untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas kompetensi dan pembelajaran. Untuk itu aktivasi akun belajar menjadi penting, berikut data aktivasi akun PMM per-2 Oktober 2023.

Tabel status aktivasi akun belajar per 2 Oktober 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Akun	Sudah Aktif	% Aktivasi
Kota Tebing Tinggi	52,697	51,077	97%
Kab. Pakpak Bharat	12,190	10,693	88%
Kab. Tapanuli Utara	69,042	58,933	85%
Kab. Humbang Hasudutan	66,316	55,636	84%
Kab. Dairi	97,246	75,050	77%
Kab. Tapanuli Tengah	45,912	34,953	76%
Kab. Samosir	30,188	22,462	74%
Kota Binjai	58,572	43,257	74%
Kab. Labuhan Batu	73,277	54,033	74%
Kab. Labuhan Batu Utara	86,193	62,958	73%
Kab. Nias	48,491	34,108	70%
Kab. Tapanuli Selatan	42,932	30,191	70%
Kab. Karo	56,387	38,500	68%
Kab. Batubara	100,334	67,810	68%
Kab. Padang Lawas utara	30,503	20,404	67%
Kab. Nias Selatan	63,163	41,490	66%
Kota Sibolga	23,477	15,418	66%
Kab. Toba	68,800	44,982	65%
Kab. Asahan	106,617	68,373	64%
Kota Pematangsiantar	82,219	51,506	63%
Kota Padang Sidempuan	38,450	23,692	62%
Kab. Labuhan Batu Selatan	58,894	35,137	60%
Kab. Serdang Bedagai	85,973	50,012	58%
Kab. Simalungun	161,648	85,043	53%
Kab. Nias Utara	40,778	20,400	50%
Kota Medan	257,957	124,278	48%
Kota Tanjung Balai	31,630	13,889	44%
Kab. Nias Barat	21,212	9,015	42%
Kab. Padang Lawas	27,241	11,434	42%
Kab. Mandailing Natal	64,727	26,116	40%
Kab. Deli Serdang	230,097	86,649	38%
Kota Gunungsitoli	28,999	9,886	34%
Rekap	2,376,713	1,438,728	61%

Sumberdata dashbord IKM. Keterangan : wilayah A yang ditandai huruf warna merah

Dari tabel diatas terjadi perubahan terhadap kinerja pelaksanaan IKM terkait aktivasi akun belajar di Sumatera Utara, diantaranya:

- Jumlah sekolah IKM yang sudah aktif akun belajarnya berjumlah 61% atau 1.438.728 akun.
- Jumlah kabupaten/kota yang sekolah pelaksana IKM sudah tuntas 100% aktif akun

belajarnya belum ada, namun 6 daerah telah mencapai diatas 75% (kategori hijau), 2 diantaranya daerah wilayah A.

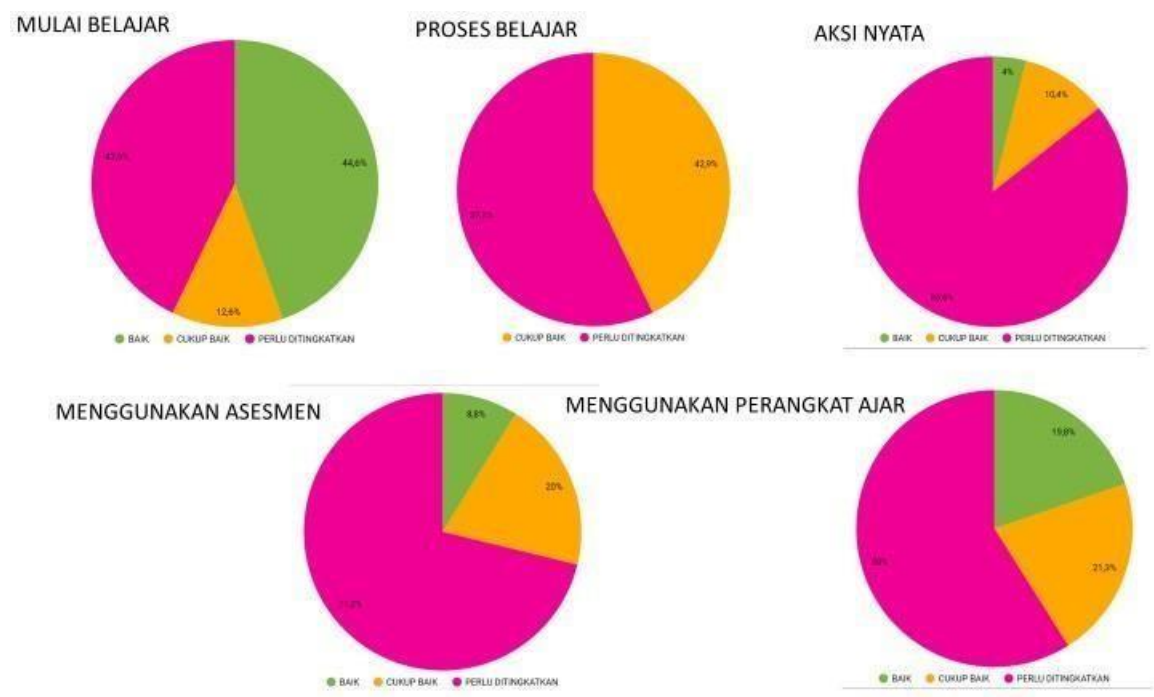
- c. Jumlah kabupaten/kota yang sekolah pelaksana IKM kategori kuning (50%-75%) terdiri 20 daerah, 4 diantaranya wilayah A. Dan masih ada 7 daerah yang kategori merah (<50%), 5 diantaranya wilayah A.

Di wilayah A, Kota Tebing Tinggi dan Tapanuli Utara menjadi 2 daerah yang terbaik dengan progres aktivasi akun 97% dan 85%.

Namun demikian satuan pendidikan yang sudah login belum tentu sudah mulai belajar, apalagi sampai tahap berikutnya menyelesaikan *post-test*, menyelesaikan topik dan bahkan mengunggah aksi nyata, yang digambarkan dalam tabel berikut.

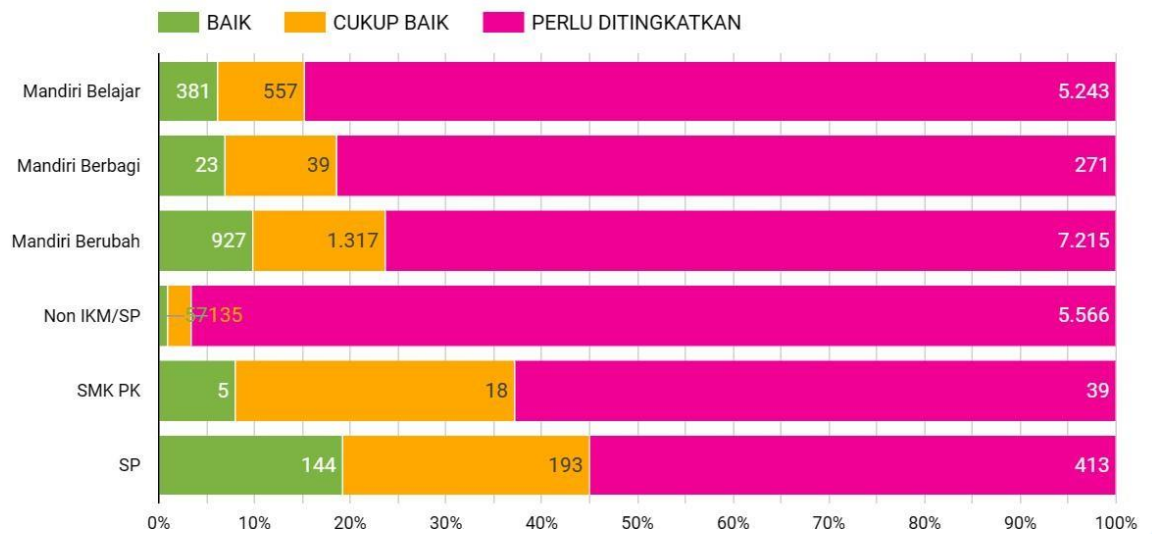
Pada bulan Juli lalu meski 84% sekolah IKM sudah melakukan login PMM, namun dari angkatersebut masih 39% yang belum mulai belajar, dan akhirnya baru 31% yang menyelesaikan topik pembelajaran dalam PMM. Kita bisa bandingkan dengan data Maret 2023 berikut.

Grafik 3.5 Pemanfaatan PMM



Sumberdata dashbord IKM.

Grafik 3.6 Grafik Aksi Nyata



Dari kedua grafik diatas, dapat dibandingkan kinerja sekolah pelaksana IKM status Juli 2022 dan Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- Jumlah sekolah yang belum mulai belajar menurun dari 39% menjadi tinggal 1,6% (108satpen).
- Jumlah sekolah yang telah selesai topik meningkat dari 31% menjadi 82%
- Jumlah daerah dengan kategori merah menurun dari 17 menjadi 0.
- Jumlah daerah dengan kategori kuning dan orange menurun dari 14 menjadi 5 daerah.
- Jumlah daerah dengan kategori hijau biru meningkat dari 2 menjadi 28 daerah.

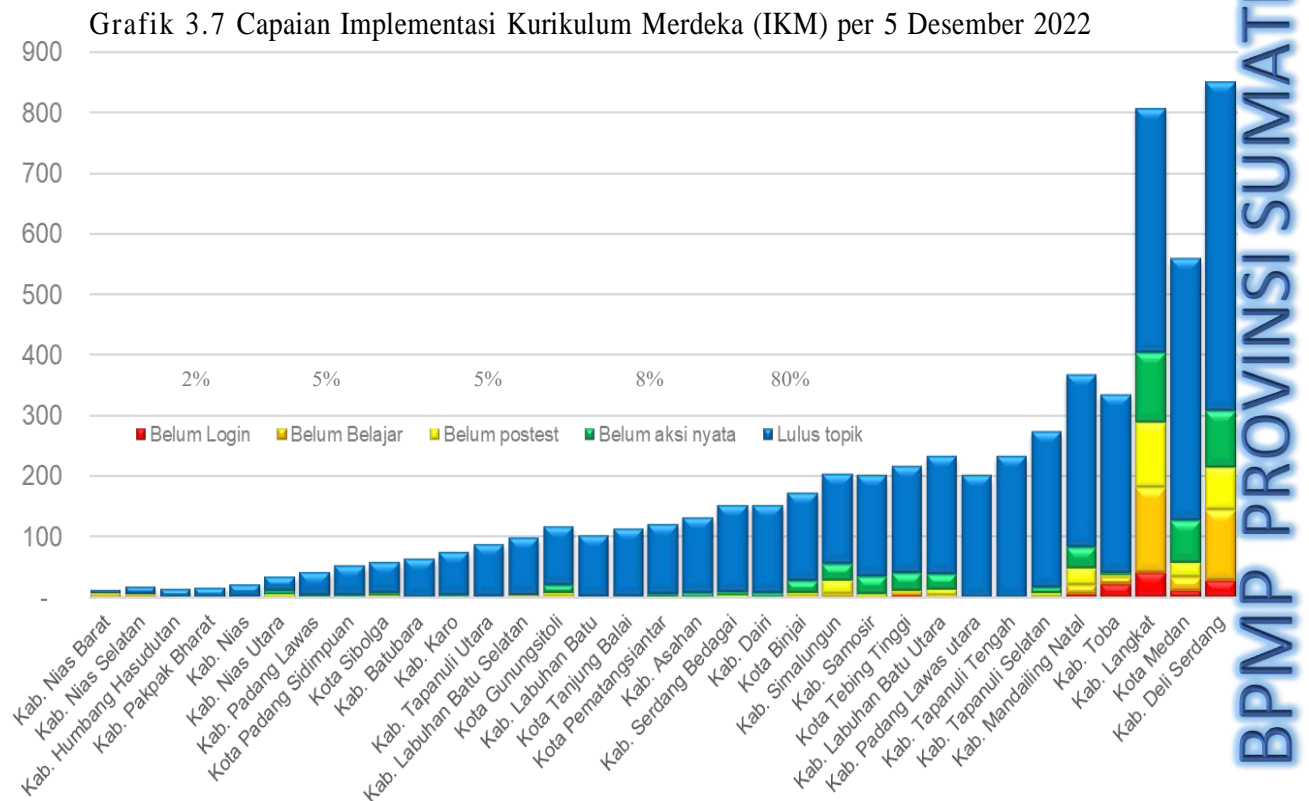
Dari tabel diatas terlihat bahwa belum ada 1 daerahpun yang sekolahnya telah 100% menyelesaikan topik dalam PMM. Namun ada 2 daerah yang hampir mencapainya, yaitu Tapanuli Tengah dan Paluta, tinggal 1 sekolah yang masih dalam proses kea arah sana. Akhir tahun 2022 (di laporan akhir) pernah ada daerah yang mencapai 100%, namun karena data berkembang, ada bertambah sekolah yang sudah login namun belum menyelesaikan topik pembelajaran.

Disisi yang lain, data Juli 2022 menunjukkan bahwa ada 2 daerah yang telah progres penyelesaian topik masih dibawah 10%, yaitu Pakpak Bharat dan Tanjungbalai. Namun seiring dengan waktu, berkat sosialisasi dan supervisi yang mencukupi maka ada kenaikan yang signifikan, dimana tidak satupun yang masih dibawah 50%.

Kendala yang terjadi tidak semua diakibatkan kesalahan sekolah. Contohnya ada beberapa

satuan pendidikan yang akun belajarnya tidak ada (tidak bisa ditampilkan), atau sudah habis masa berlakunya akunnya karena tidak pernah dibuka, ketika dibuat surat ajuan ke Pusdatin untuk diregistrasi lagi lebih dari 4 bulan belum ada tindak lanjut. Infonya margin *error* dari *platform* masih 10%.

Selain tabel diatas, grafik berikut menunjukkan sisi yang berbeda dimana jumlah sekolah tidak dihitung dalam prosen, namun dalam jumlah.

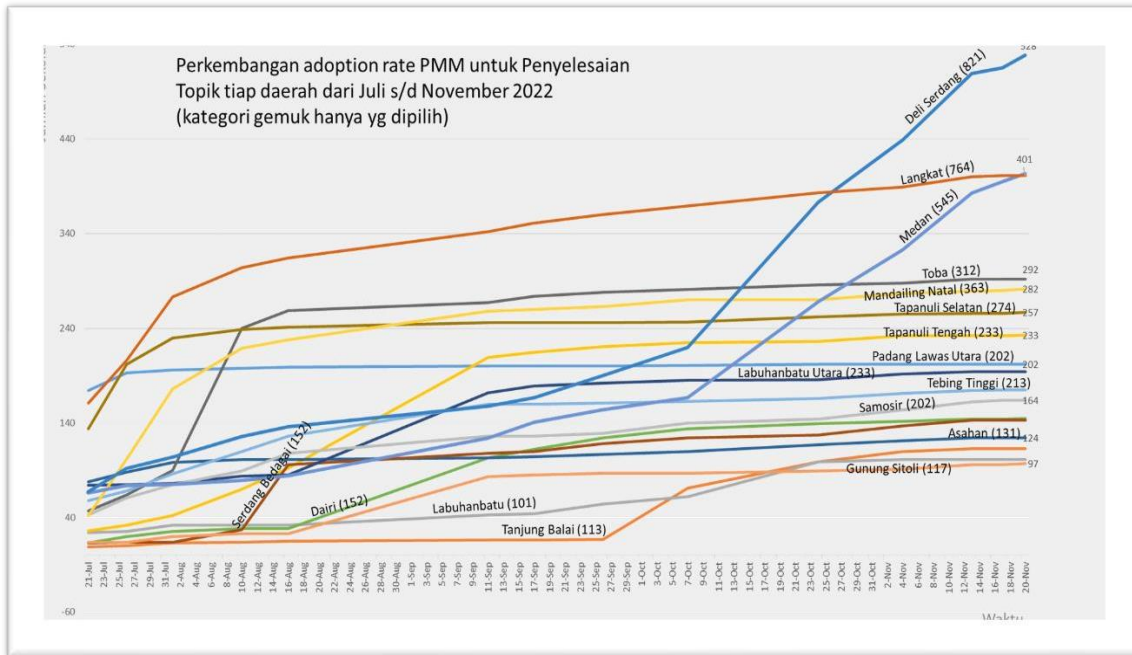


Sumberdata dashbord IKM.

Bila dari tabel sebelumnya menunjukkan bahwa 3 kabupaten/kota dengan jumlah sekolah pelaksana IKM terbesar (Deli Serdang, Langkat, Medan) selalu di rangking bawah dalam kinerja, maka dalam model ini ketiga daerah menempati posisi paling tinggi dalam penyelesaian topik di PMM. Namun terlihat juga bahwa sisanya masih cukup besar, 48% di Langkat, 35% di Deli Serdang dan 22% di Medan yang masih harus dikejar.

Dari grafik berikut terlihat bahwa perkembangannya cukup spesifik untuk setiap kabupaten/kota. Ada yang landai seiring dengan waktu. Ada yang pada saat tertentu mengalami lonjakan perkembangan. Ada yang sejak awal sudah tinggi. Ada yang semakin lama semakin meninggi.

Grafik 3.8 perkembangan capaian selesai topik PMM setiap minggu per kab/kota

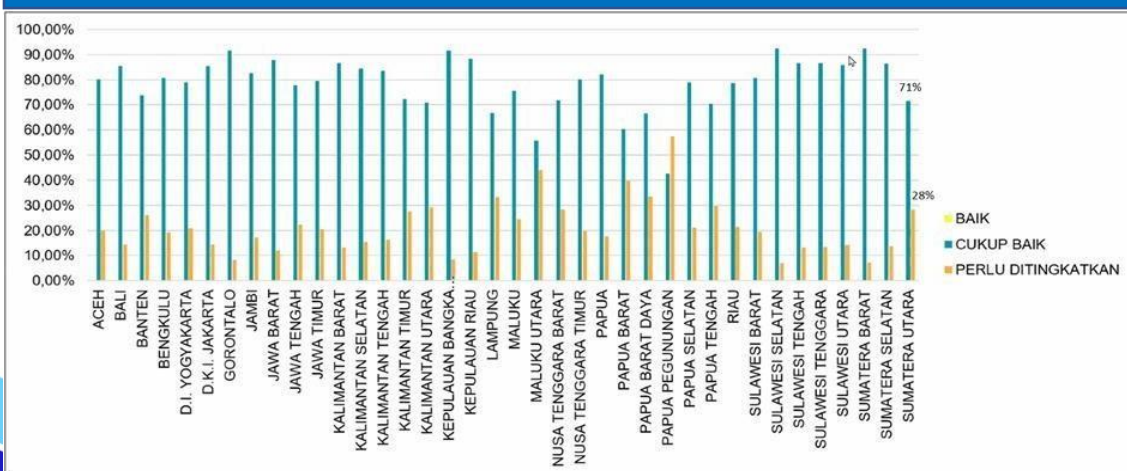


Diolah dari data dashbord IKM

Dari grafik ini daerah bisa dikategorikan berdasar pertumbuhannya:

- Daerah yg reponsif sejak awal. Sejak bulan Juli terlihat tinggi (diatas 100), seperti Langkat, Tapsel dan Paluta
- Daerah yg responsif saat ‘dibangunkan’, Toba, Sergai, Tapteng, Tanjungbalai, Laburadst
- Daerah yang pertumbuhannya semakin lama semakin meninggi seiring dengan waktu, yaitu Deli Serdang, Medan
- Daerah stabil pertumbuhannya, yaitu Labuhanbatu, Samosir, Tebing Tinggi, Asahan

Grafik 3.9 Grafik Chart Monitoring Progress (Matriks Level 2 – Progres Belajar)



*data yang ditampilkan per 19 Desember 2023.

3.2.2 Miskonsepsi IKM

Dalam pelaksanaannya, telah terjadi kesalahan pendapat yang beredar atau miskonsepsi. Hal ini mempengaruhi sekolah pada saat mendaftar atau pada saat pelaksanaan program. Miskonsepsi tersebut antara lain:

- a. Kurikulum Merdeka itu bebas tanpa adanya rambu-rambu yang jelas;
- b. *Helpdesk* IKM adalah *helpdesk* yang sama dengan *helpdesk* Belajar.id;
- c. Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tidak dianggarkan melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah, sehingga sekolah memungut uang dari orang tua;
- d. Pelaksanaan P5 di sekolah berorientasi pada hasil (produk) bukan pada proses pelaksanaannya;
- e. Rapor pendidikan bertujuan untuk melakukan perankingan terhadap Sekolah Penggerak.
- f. Dinas Pendidikan menunjuk sekolah menjadi pelaksana program IKM;
- g. *Helpdesk* IKM disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- h. Sekolah menunggu arahan dari Kepala Dinas Pendidikan yang mewajibkan semua sekolah mendaftar IKM Mandiri;
- i. Pelaksanaan P5 di sekolah memerlukan dana yang besar;
- j. Setiap mata pelajaran wajib melaksanakan P5 ;
- k. Terdapat pelatihan IKM berjenjang seperti pada kurikulum 2013;

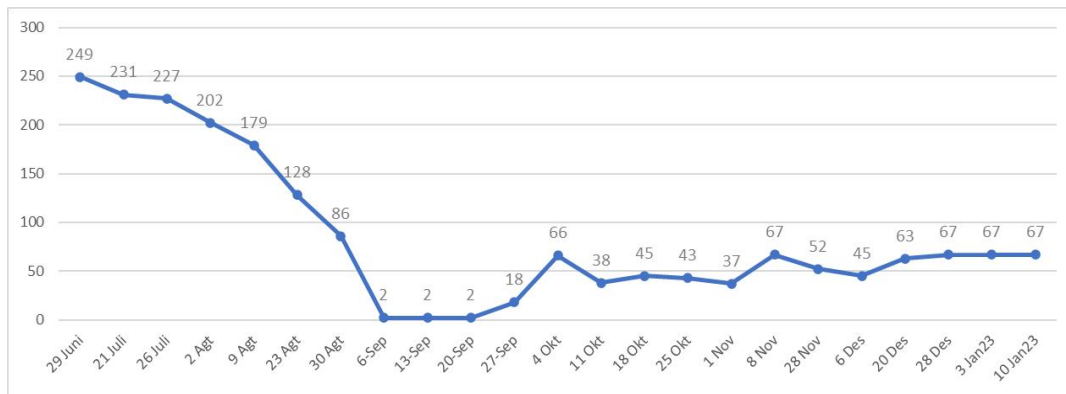
3.2 Pokja Manajemen Operasional (PMO) Daerah

Dibentuknya PMO Daerah menjadi forum koordinasi di Dinas Pendidikan yang merencanakan, melaksanakan dan memonitor pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan.

Saat ini rapat-rapat PMO Daerah dilaksanakan secara rutin setiap bulan baik secara luring maupun daring. Sebagai sebuah rapat koordinasi, maka agenda kegiatan rapat PMO selalu diawali dengan identifikasi pelaksanaan program prioritas di lapangan dan mencatat kendala atau resiko yang membuat pelaksanaan program terhambat.

Untuk mendapatkan gambaran jumlah hambatan dan hambatan terbanyak yang masih belum selesai dan valid perlu dilakukan cleansing data dan koordinasi saat persiapan PMO dilakukan dengan baik.

Grafik 3.10 perkembangan jumlah isu yang dieskalasi di daerah di Sumatera Utara per minggu



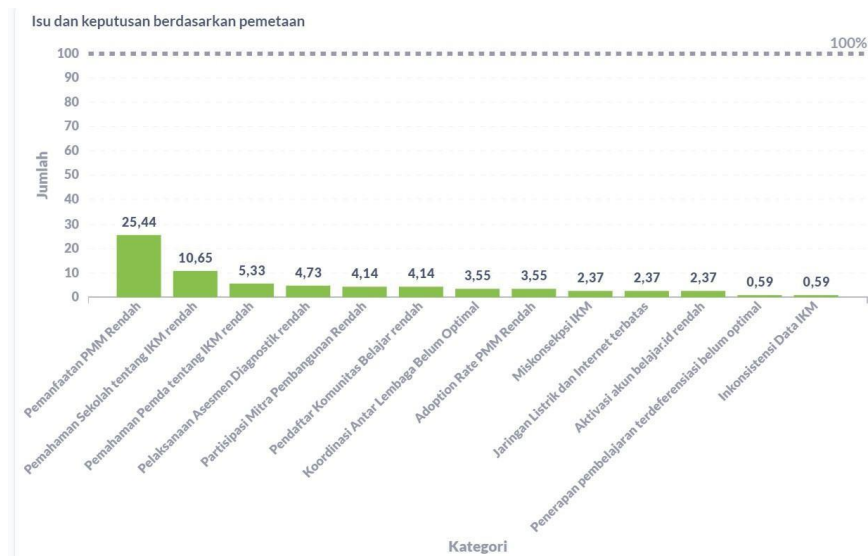
Diolah dari data Rapat Reboan

Dari grafik diatas terlihat bahwa tadinya jumlah isu cukup tinggi yaitu 249, sebagian merupakan isu tahun lalu yang belum diselesaikan. Dalam rapat mingguan setiap hari Rabu, Kemendikbudristek mendorong penyelesaian setiap isu dan segera ditutup ketika isu sudah direspon. Dengan demikian isu yang dieskalasi ke daerah turun secara signifikan di bulan September menjadi 2 isu.

Dalam hal ini, tim PMO UPT melakukan langkah berikut:

1. Menutup hambatan yang sudah diselesaikan
2. Menindaklanjuti hambatan yang belum diselesaikan kepada Fasilitator Sekolah Penggerak
3. Memvalidasi hambatan yang dieskalasi
 - a. Diterima jika hambatan valid dan perlu dukungan tim PMO daerah
 - b. Dikembalikan jika hambatan dapat diselesaikan oleh satuan pendidikandengan memberikan solusi yang sesuai
 - c. Ditolak jika hambatan tidak valid

Grafik 3.11 Pengelompokan isu yang dieskalasi di daerah di Sumatera Utara



Dari grafik diatas terlihat bahwa isu terbesar yang dieskalasi adalah masih kesulitan dalam pemanfaatan PMM sebagai media belajar baru para guru. Disusul kesulitan mendaftarkan komunitas belajar dan pemahaman Dinas terkait IKM yang masih rendah.

Dalam menjalankan tugas dalam mendampingi rapat PMO, penulis telah hadir setidaknya di 8 daerah baik secara luring atau daring. Daerah yang penulis kunjungi dengan luring adalah: Medan, Simalungun, Pematang Siantar, Binjai, Deli Serdang, Padang Lawas, Samosir, Tapanuli Utara, dan Provinsi. Amatan penulis saat mengikuti rapat PMO Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas rapat PMO Daerah cukup beragam, sangat tergantung pada kemampuan koordinator dari BPMP dalam mengorganisir dan komitmen pimpinan Dinas Pendidikan/ koordinator PMO.
- b. Rapat PMO secara daring sebagian besar kurang efektif dilihat dari sisi kehadiran peserta dan komposisinya. Ini dikarenakan rapat daring belum membudaya dan Tim PMO akan cenderung kurang memprioritaskan dibanding kegiatan lain.
- c. Kehadiran Kepala Dinas sangat menentukan. Hadirnya Kadis akan memastikan hadirnya Kabid dan Kasi yang terkait dengan materi yang dibahas. Hadirnya Kadis juga memastikan bahwa pelaksanaan PSP dan IKM berjalan diatas rel yang benar, dan bila ada isu akan diatasi dengan baik.
- d. Keterlibatan pihak BBGP dalam rapat PMO baru terjalin di akhir tahun sehingga belum banyak menyentuh kualitas pembelajaran di sekolah PSP.

Selanjutnya rapat PMO diharapkan semakin efektif dalam mengawal program prioritas:

- a. PMO memiliki pemahaman yang cukup soal program prioritas dan strategi implementasinya
- b. PMO dari seluruh daerah memiliki Perencanaan dan Program Kerja PMO terkait Program Prioritas Kemdikbud.
- c. PMO dari seluruh daerah mampu menggerakkan Satuan Pendidikan dan Kelompok Kerja/Musyawahar Guru dalam mempercepat pelaksanaan Kurikulum Merdeka.
- d. PMO dari seluruh daerah mampu memasukkan anggaran untuk mendukung Program Prioritas Kemdikbud dalam Perubahan APBD tahun 2023 dan RAPBD tahun 2024.
- e. PMO dari seluruh daerah mampu mengoptimalkan penyusunan Anggaran RKAS sesuai dengan Rapor Pendidikan dan regulasi terkait.

3.3 Perencanaan Berbasis Data (PBD)

Perencanaan yang baik berbasis data yang akurat. Dalam hal ini perencanaan pendidikan daerah selayaknya didasarkan pada data permasalahan pendidikan yang sesuai, salah satunya dari rapor pendidikan. Begitu juga perencanaan di tingkat sekolah.

Aturan tentang perencanaan ini daerah merujuk pada Permendagri 81 tahun 2021 yang wajib ditaati pemerintah daerah. Dalam aturan ini ada perubahan indikator kinerja urusan, ada panduan menyusun kegiatan dan penganggaran. Harapannya perencanaan pendidikan sesuai dengan prioritas pendidikan yang dicanangkan pemerintah dan menyelesaikan masalah yang menghambat serta mengarahkan pada mutu pendidikan yang diharapkan.

Capaian kegiatan Perencanaan Berbasis Data baik di daerah maupun di satuan pendidikan diharapkan:

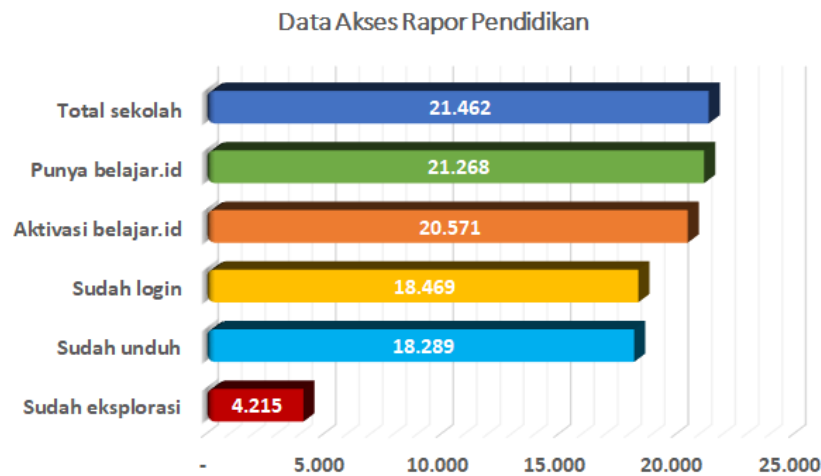
- a. Seluruh Kabupaten/Kota akan memasukkan anggaran Program Prioritas pada anggaran APBD Tahun 2024 sesuai dengan Permendagri 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. Satuan Pendidikan dari seluruh Kabupaten/Kota akan menyusun anggaran pada RKAS sesuai dengan Rapor Pendidikan.

Tabel 3.6 Data Akses Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Kabupaten/Kota	Total Sekolah	Punya belajar.id	Aktivasi belajar.id	Sudah login	Sudah eksplorasi	Sudah unduh
KOTA TEBING TINGGI	233	100%	100%	100%	17.6%	100%
KAB. PADANG LAWAS UTARA	404	100%	100%	100%	8.91%	100%
KAB. TAPANULI TENGAH	666	100%	100%	98.65%	22.22%	98.05%
KOTA SIBOLGA	129	99.22%	99.22%	96.9%	10.08%	96.9%
KAB. SIMALUNGUN	1,443	99.65%	99.38%	95.5%	38.12%	95.01%
KOTA GUNUNGSITOLI	249	99.6%	99.6%	95.58%	10.04%	93.57%
KAB. TAPANULI SELATAN	540	99.81%	99.26%	93.89%	18.15%	93.52%
KOTA PEMATANGSIANTAR	337	100%	99.41%	94.36%	20.18%	92.88%
KOTA PADANG SIDIMPUAN	230	99.57%	96.52%	93.48%	29.13%	92.61%
KAB. SAMOSIR	378	99.21%	97.09%	92.33%	26.72%	92.06%
KAB. NIAS SELATAN	754	99.47%	99.34%	92.97%	4.51%	91.91%
KAB. DELI SERDANG	2,302	99.44%	97.61%	91.96%	20.63%	91.49%
KAB. NIAS	339	97.35%	97.35%	90.86%	59%	90.86%
KAB. TAPANULI UTARA	754	99.87%	99.2%	89.39%	34.62%	89.39%
KOTA MEDAN	2,253	99.47%	96.01%	89.3%	6.3%	87.71%
KAB. LABUHAN BATU SELATAN	462	98.92%	96.97%	88.53%	11.69%	87.23%
KOTA BINJAI	387	98.97%	95.35%	87.86%	30.23%	86.82%
KAB. KARO	522	99.23%	97.13%	85.25%	25.86%	85.25%
KAB. ASAHAN	968	98.45%	97.62%	86.26%	10.54%	85.02%
KAB. LABUHAN BATU UTARA	557	98.92%	98.74%	84.38%	41.65%	84.2%
KAB. NIAS UTARA	407	97.54%	95.82%	83.05%	17.94%	81.33%
KAB. DAIRI	492	96.95%	91.26%	82.11%	16.06%	80.89%
KAB. LABUHAN BATU	631	99.05%	99.05%	80.98%	33.6%	80.19%
KAB. MANDAILING NATAL	761	98.95%	92.25%	79.24%	34.56%	78.58%
KAB. SERDANG BEDAGAI	975	99.79%	90.15%	79.08%	11.9%	78.56%
KAB. NIAS BARAT	241	99.17%	97.51%	77.59%	14.11%	77.18%
KOTA TANJUNG BALAI	196	96.94%	87.76%	77.04%	7.14%	75.51%
KAB. TOBA	489	99.18%	94.07%	76.07%	49.49%	75.05%
KAB. PADANG LAWAS	467	98.72%	83.51%	74.95%	4.71%	72.38%
KAB. BATUBARA	600	98.33%	95%	72.83%	8.33%	71.5%
KAB. HUMBANG HASUDUTAN	514	99.42%	96.89%	71.21%	6.81%	70.82%
KAB. LANGKAT	1,612	98.01%	87.41%	70.53%	7.2%	69.54%
KAB. PAKPAK BHARAT	154	99.35%	98.7%	64.94%	36.36%	64.29%
KAB. TOBA SAMOSIR	12	100%	91.67%	58.33%	33.33%	58.33%
Total	21.462	21.268	20.571	18.469	4.215	18.289
%	100%	99.10%	95.85%	86.05%	19.64%	85.22%

Sumber data : Dashboard Adopsi Rapor Pendidikan per tanggal 22 Januari 2023

Grafik 3.12 Data Akses Rapor Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara



Dari data di atas terlihat bahwa 86,05% atau 18.469 satpen telah memanfaatkan dengan telah melakukan login ke rapor pendidikan. Ini meningkat dibanding status bulan Juli 2022 yang baru 37%. Namun ini berarti menyisakan 13,95% atau 2.993 sekolah yang belum memanfaatkan rapor pendidikan, hal ini umumnya terjadi di jenjang PAUD, dan ini masih bisa dimaklumi. Namun bisa dipastikan perencanaannya tidak berbasis rapor pendidikan.

Data *dashbord* di atas menunjukkan bahwa masih terdapat daerah dan sekolah yang perencanaannya belum didasarkan pada rapor pendidikan, artinya sebagian besar sekolah di semua daerah belum melakukan perencanaan berbasis pada rapor pendidikan.

3.4 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dan tata cara pemenuhan standar.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan. Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Permendagri 59 Tahun 2021 dan diturunkan dengan Permendikbud

No.32 tahun 2022, maka indeks capaian SPM oleh pemerintah daerah dibuat kategori sebagai berikut.

- 100 (Tuntas Paripurna)
- 90-99 (Tuntas Utama)
- 80-89 (Tuntas Madya)
- 70-79 (Tuntas Pratama)
- 60-69 (Tuntas Muda)
- <60 (Belum Tuntas)

Setelah proses advokasi dibawah Pokja-3, untuk tahun 2023, ada 6 daerah di Sumatera Utara yang sudah mencapai kategori Tuntas Muda (nilai 60 keatas), sisanya . dimana Kabupaten Dairi memperoleh nilai tertinggi yaitu 65,86, disusul Toba, Samosir, Tebing Tinggi, Pematangsiantar dan Humbang Hasundutan. Secara rata-rata Sumatera Utara mencapai angka 58,58 yang berarti masih Belum Tuntas.

Tabel 3.7 Daftar daerah dengan kategori capaian SPM di Sumatera Utara tahun 2023

No	Dinas Kabupaten/Kota	Indeks SPM	Kategori	No	Dinas Kabupaten/Kota	Indeks SPM	Kategori
1	Kab. Dairi	65,86	Tuntas Muda	18	Kab. Serdang Bedagai	55,97	Belum Tuntas
2	Kab. Toba	64,94	Tuntas Muda	19	Kab. Mandailing Natal	55,74	Belum Tuntas
3	Kab. Samosir	63,89	Tuntas Muda	20	Kab. Labuhan Batu Selatan	55,2	Belum Tuntas
4	Kota Tebing Tinggi	63,82	Tuntas Muda	21	Kab. Batubara	54,11	Belum Tuntas
5	Kota Pematangsiantar	63,67	Tuntas Muda	22	Kab. Simalungun	53,83	Belum Tuntas
6	Kab. Humbang Hasudutan	61,96	Tuntas Muda	23	Kab. Langkat	52,25	Belum Tuntas
7	Kota Binjai	59,44	Belum Tuntas	24	Kota Gunungsitoli	51,7	Belum Tuntas
8	Kab. Tapanuli Selatan	58,81	Belum Tuntas	25	Kab. Labuhan Batu	51,66	Belum Tuntas
9	Kota Sibolga	58,8	Belum Tuntas	26	Kab. Labuhan Batu Utara	51,63	Belum Tuntas
10	Kota Medan	58,78	Belum Tuntas	27	Kab. Tapanuli Tengah	51,47	Belum Tuntas
11	Kab. Karo	58,58	Belum Tuntas	28	Kab. Nias Utara	51,44	Belum Tuntas
12	Kab. Pakpak Bharat	57,97	Belum Tuntas	29	Kab. Nias Barat	51,15	Belum Tuntas
13	Kab. Tapanuli Utara	57,72	Belum Tuntas	30	Kab. Nias	51,09	Belum Tuntas
14	Kab. Deli Serdang	57,14	Belum Tuntas	31	Kota Tanjung Balai	49,12	Belum Tuntas
15	Kab. Padang Lawas	57,08	Belum Tuntas	32	Kab. Padang Lawas utara	46,07	Belum Tuntas
16	Kab. Asahan	56,59	Belum Tuntas	33	Kab. Nias Selatan	38,64	Belum Tuntas
17	Kota Padang Sidempuan	56,05	Belum Tuntas				

Untuk perencanaan 2024, BPMP melakukan advokasi secara masif di awal dan pertengahan tahun agar indikator dan program SPM masuk dalam perencanaan. Bulan Mei 2023 saat pertemuan Bappeda provinsi dan Bappeda kabupaten/kota, indikator baru SPM masih banyak yang belum masuk. Dan hingga akhir tahun sudah ada 24 daerah yang telah memasukkan indikator SPM secara komplit. Kebanyakan daerah mencapai indikator terbaik pada Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 tahun (pendidikan dasar), namun ternyata terendah untuk indikator APS usia 5-6 tahun (PAUD).

Tabel 3.8 capaian masuknya indikator SPM dalam perencanaan daerah

Daerah	INDIKATOR RKPD			
	eRakortek	RKPD	RKPD	SESUAI
	25-Oct	25-Oct	7-Nov	25-Oct
Provinsi Sumatera Utara		100%	100%	1
Kab. Asahan		100%	100%	1
Kab. Dairi	100%	100%	100%	1
Kab. Deli Serdang		100%	100%	1
Kab. Karo	53%	100%	100%	1
Kab. Labuhanbatu		60%	60%	
Kab. Langkat	13%	100%	100%	1
Kab. Mandailing Natal		20%	20%	
Kab. Nias	47%	93%	93%	
Kab. Simalungun		33%	33%	
Kab. Tapanuli Selatan		60%	60%	
Kab. Tapanuli Tengah		93%	93%	
Kab. Tapanuli Utara	20%	87%	87%	
Kab. Toba Samosir	60%	100%	100%	1
Kota Binjai		100%	100%	1
Kota Medan		67%	67%	
Kota Pematang Siantar		100%	100%	1
Kota Sibolga	100%	100%	100%	1
Kota Tanjung Balai		100%	100%	1
Kota Tebing Tinggi	73%	100%	100%	1
Kota Padang Sidempuan	80%	100%	100%	1
Kab. Pakpak Bharat	40%	60%	60%	
Kab. Nias Selatan	93%	100%	100%	1
Kab. Humbang Hasundutan	100%	100%	100%	1
Kab. Serdang Bedagai		100%	100%	1
Kab. Samosir		100%	100%	1
Kab. Batu Bara		100%	100%	1
Kab. Padang Lawas	7%	87%	87%	
Kab. Padang Lawas Utara	80%	100%	100%	1
Kab. Labuhanbatu Selatan		100%	100%	1
Kab. Labuhanbatu Utara		100%	100%	1
Kab. Nias Utara		100%	100%	1
Kab. Nias Barat	100%	100%	100%	1
Kota Gunungsitoli		100%	100%	1

Namun proses belum berakhir. Setelah memasukkan indikator, Dinas Pendidikan perlu memasukkan kegiatan dan anggaran untuk indikator tersebut. Dalam SIPD telah diberikan rekomendasi kegiatan yang sesuai dengan hasil rapor pendidikan, baik untuk prioritas 1, prioritas 2 dan seterusnya. Petunjuk ini sangat membantu Dinas untuk memilih kegiatan apa yang paling sesuai harapan untuk mencapai target.

KPI-nya adalah daerah perlu mencapai 50% dari subkegiatan yang ditawarkan. Dari tabel berikut terlihat bahwa baru 10 daerah yang telah mencapai KPI tersebut atau 29% (kuning). Bila dibandingkan provinsi lain ada 12 provinsi yang telah mencapai di atas 50% (hijau), termasuk DKI Jakarta yang telah 100%.

Tabel 3.9 Tabel Capaian Objective Subkegiatan Prioritas Per Provinsi

No	Provinsi	Jumlah Pemda	Perencanaan		Penganggaran		No	Provinsi	Jumlah Pemda	Perencanaan		Penganggaran	
			Rakortek	RKPD	SEP	OKT*				Rakortek	RKPD	SEP	OKT*
1	ACEH	24	0%	0%	13%	13%	20	KALIMANTAN BARAT	15	0%	0%	27%	47%
2	SUMATERA UTARA	34	6%	12%	21%	29%	21	KALIMANTAN TENGAH	15	40%	40%	47%	60%
3	SUMATERA BARAT	20	0%	5%	20%	20%	22	KALIMANTAN SELATAN	14	14%	14%	29%	50%
4	RIAU	13	8%	8%	15%	31%	23	KALIMANTAN TIMUR	11	0%	0%	18%	18%
5	JAMBI	12	67%	67%	33%	67%	24	KALIMANTAN UTARA	6	17%	50%	17%	50%
6	SUMATERA SELATAN	18	17%	17%	0%	22%	25	SULAWESI UTARA	16	6%	6%	25%	25%
7	BENGKULU	11	0%	0%	18%	18%	26	SULAWESI TENGAH	14	0%	0%	21%	21%
8	LAMPUNG	16	13%	13%	6%	13%	27	SULAWESI SELATAN	25	0%	0%	20%	20%
9	KEP. BANGKA BELITUNG	8	0%	0%	13%	25%	28	SULAWESI TENGGARA	18	6%	11%	33%	39%
10	KEPULAUAN RIAU	8	0%	0%	25%	25%	29	GORONTALO	7	14%	0%	43%	57%
11	DKI JAKARTA	1	100%	100%	0%	100%	30	SULAWESI BARAT	7	14%	43%	29%	57%
12	JAWA BARAT	28	21%	18%	18%	50%	31	MALUKU	12	0%	0%	17%	17%
13	JAWA TENGAH	36	0%	0%	19%	25%	32	MALUKU UTARA	11	27%	27%	18%	45%
14	DI YOGYAKARTA	6	0%	0%	50%	67%	33	PAPUA BARAT	8	0%	0%	0%	0%
15	JAWA TIMUR	39	0%	0%	21%	26%	34	PAPUA BARAT DAYA	7	0%	0%	29%	29%
16	BANTEN	9	0%	0%	56%	56%	35	PAPUA	10	0%	0%	0%	10%
17	BAU	10	10%	10%	40%	50%	36	PAPUA PEGUNUNGAN	9	0%	0%	0%	0%
18	NUSA TENGGARA BARAT	11	55%	55%	18%	55%	37	PAPUA SELATAN	5	0%	20%	0%	20%
19	NUSA TENGGARA TIMUR	23	0%	0%	9%	9%	38	PAPUA TENGAH	9	0%	0%	0%	11%
							TOTAL		546	8%	10%	20%	30%

Catatan: *) Data merupakan subkegiatan tertinggi per cut-off Agt, Sep, dan Okt

Tabel 3.10 Tabel Capaian Objective Subkegiatan Prioritas Per Kabupaten/Kota

Daerah	eRakortek	RKPD	SIPD	Adj. Capaian	SESUAI
	26-Oct	26-Oct	25-Oct	Max (E-I)	
Provinsi Sumatera Utara	0%	0%	8%	8%	
Kab. Asahan	0%	3%	37%	37%	
Kab. Dairi	5%	6%	73%	73%	1
Kab. Deli Serdang	0%	14%	60%	60%	1
Kab. Karo	65%	92%	18%	92%	1
Kab. Labuhanbatu	0%	0%	27%	28%	
Kab. Langkat	0%	21%	25%	25%	
Kab. Mandailing Natal	0%	10%	22%	22%	
Kab. Nias	9%	9%	23%	23%	
Kab. Simalungun	0%	1%	40%	40%	
Kab. Tapanuli Selatan	0%	16%	5%	16%	
Kab. Tapanuli Tengah	12%	67%	63%	67%	1
Kab. Tapanuli Utara	14%	14%	13%	14%	
Kab. Toba Samosir	0%	15%	28%	28%	
Kota Binjai	1%	18%	32%	32%	
Kota Medan	1%	11%	2%	28%	
Kota Pematang Siantar	0%	30%	42%	42%	
Kota Sibolga	30%	34%	55%	55%	1
Kota Tanjung Balai	0%	1%	15%	15%	
Kota Tebing Tinggi	24%	24%	48%	48%	
Kota Padang Sidempuan	2%	30%	50%	50%	1
Kab. Pakpak Bharat	15%	15%	12%	15%	
Kab. Nias Selatan	0%	0%	42%	42%	
Kab. Humbang Hasundutan	13%	14%	27%	27%	
Kab. Serdang Bedagai	60%	63%	60%	63%	1
Kab. Samosir	0%	13%	77%	77%	1
Kab. Batu Bara	5%	13%	23%	23%	
Kab. Padang Lawas	13%	13%	33%	33%	
Kab. Padang Lawas Utara	28%	28%	53%	53%	1
Kab. Labuhanbatu Selatan	0%	3%	45%	45%	
Kab. Labuhanbatu Utara	0%	26%	30%	30%	
Kab. Nias Utara	0%	65%	25%	65%	1
Kab. Nias Barat	10%	46%	48%	48%	
Kota Gunungsitoli	0%	11%	27%	27%	

Gambar 3.1 Komitmen Daerah

Perlu diketahui sejauh mana komitmen Pemda dalam menjalankan Kebijakan Merdeka Belajar / Program Sekolah Penggerak



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

BPMP PROVINSI SUMATERA

Tabel 3.11 Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka

Rekapitulasi per Wilayah			Rekapitulasi per Wilayah		
Wilayah	Level	Fase	Wilayah	Level	Fase
Prov. Sumatera Utara			Prov. Sumatera Utara		
Prov. Sumatera Utara	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi	Prov. Sumatera Utara	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Asahan	Paham	Terinformasikan	Kab. Asahan	Peduli	Terinformasikan
Kab. Batubara	Paham	Terinformasikan	Kab. Batubara	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Dairi	Terhubung	Terinformasikan	Kab. Dairi	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Deli Serdang	Paham	Terinformasikan	Kab. Deli Serdang		
Kab. Humbang Hasudutan	Terhubung	Terinformasikan	Kab. Humbang Hasudutan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Karo	Paham	Terinformasikan	Kab. Karo	Peduli	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu	Tertanam	Berkomitmen	Kab. Labuhan Batu	Peduli	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu Selatan	Paham	Terinformasikan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu Utara	Paham	Terinformasikan	Kab. Labuhan Batu Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Langkat	Paham	Terinformasikan	Kab. Langkat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Mandailing Natal	Terhubung	Terinformasikan	Kab. Mandailing Natal		
Kab. Nias	Peduli	Terinformasikan	Kab. Nias		
Kab. Nias Barat	Paham	Terinformasikan	Kab. Nias Barat	Peduli	Terinformasikan
Kab. Nias Selatan	Paham	Terinformasikan	Kab. Nias Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias Utara	Paham	Terinformasikan	Kab. Nias Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Padang Lawas	Peduli	Terinformasikan	Kab. Padang Lawas	Peduli	Terinformasikan
Kab. Padang Lawas utara	Paham	Terinformasikan	Kab. Padang Lawas utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Pakpak Bharat	Terhubung	Terinformasikan	Kab. Pakpak Bharat	Peduli	Terinformasikan
Kab. Samosir	Paham	Terinformasikan	Kab. Samosir	Peduli	Terinformasikan
Kab. Serdang Bedagai	Paham	Terinformasikan	Kab. Serdang Bedagai	Peduli	Terinformasikan
Kab. Simalungun	Terhubung	Terinformasikan	Kab. Simalungun	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Selatan	Paham	Terinformasikan	Kab. Tapanuli Selatan	Peduli	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Tengah	Peduli	Terinformasikan	Kab. Tapanuli Tengah	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Utara	Peduli	Terinformasikan	Kab. Tapanuli Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Toba	Peduli	Terinformasikan	Kab. Toba	Peduli	Terinformasikan
Kota Binjai	Peduli	Terinformasikan	Kota Binjai	Terhubung	Terinformasikan
Kota Gunungsitoli	Paham	Terinformasikan	Kota Gunungsitoli	Peduli	Terinformasikan
Kota Medan	Terhubung	Terinformasikan	Kota Medan	Terhubung	Terinformasikan
Kota Padang Sidempuan	Paham	Terinformasikan	Kota Padang Sidempuan	Peduli	Terinformasikan
Kota Pematangsiantar	Peduli	Terinformasikan	Kota Pematangsiantar	Peduli	Terinformasikan
Kota Sibolga	Paham	Terinformasikan	Kota Sibolga	Peduli	Terinformasikan
Kota Tanjung Balai	Paham	Terinformasikan	Kota Tanjung Balai	Peduli	Terinformasikan
Kota Tebing Tinggi	Paham	Terinformasikan	Kota Tebing Tinggi	Peduli	Terinformasikan

Tabel 3.12 Rekapitulasi Program Guru Penggerak Per Wilayah

Rekapitulasi per Wilayah		
Wilayah	Level	Fase
Prov. Sumatera Utara		
Prov. Sumatera Utara	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Asahan	Tertanam	Berkomitmen
Kab. Batubara	Paham	Terinformasikan
Kab. Dairi	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Deli Serdang		
Kab. Humbang Hasudutan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Karo	Adopsi	Terbina
Kab. Labuhan Batu	Melembaga	Berkomitmen
Kab. Labuhan Batu Selatan		
Kab. Labuhan Batu Utara	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Langkat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Mandailing Natal	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Nias Barat	Adopsi	Terbina
Kab. Nias Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Padang Lawas		
Kab. Padang Lawas utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Pakpak Bharat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Samosir	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Serdang Bedagai	Peduli	Terinformasikan
Kab. Simalungun	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Selatan	Paham	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Tengah		
Kab. Tapanuli Utara	Paham	Terinformasikan
Kab. Toba	Paham	Terinformasikan
Kota Binjai	Terhubung	Terinformasikan
Kota Gunungsitoli	Paham	Terinformasikan
Kota Medan		
Kota Padang Sidempuan	Terhubung	Terinformasikan
Kota Pematangsiantar	Peduli	Terinformasikan
Kota Sibolga	Paham	Terinformasikan
Kota Tanjung Balai	Peduli	Terinformasikan
Kota Tebing Tinggi	Paham	Terinformasikan

Tabel 3.13 Rekapitulasi Asesmen Nasional Per Wilayah

Rekapitulasi per Wilayah		
Wilayah	Level	Fase
Prov. Sumatera Utara		
Prov. Sumatera Utara	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Asahan	Paham	Terinformasikan
Kab. Batubara	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Dairi	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Deli Serdang		
Kab. Humbang Hasudutar	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Karo	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu	Peduli	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu Selata		
Kab. Labuhan Batu Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Langkat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Mandailing Natal	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias	Peduli	Terinformasikan
Kab. Nias Barat	Paham	Terinformasikan
Kab. Nias Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Padang Lawas	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Padang Lawas utara	Paham	Terinformasikan
Kab. Pakpak Bharat	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Samosir	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Serdang Bedagai	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Simalungun	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Tengah	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Utara	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Toba	Terhubung	Terinformasikan
Kota Binjai	Terhubung	Terinformasikan
Kota Gunungsitoli	Terhubung	Terinformasikan
Kota Medan	Terhubung	Terinformasikan
Kota Padang Sidempuan	Peduli	Terinformasikan
Kota Pematangsiantar	Terhubung	Terinformasikan
Kota Sibolga	Paham	Terinformasikan
Kota Tanjung Balai	Terhubung	Terinformasikan
Kota Tebing Tinggi	Peduli	Terinformasikan

Tabel 3.14 Rekapitulasi Transformasi Pendidikan Khusus

Wilayah	Level	Fase
Prov. Sumatera Utara		
Prov. Sumatera Utara		
Kab. Asahan		
Kab. Batubara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Dairi	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Deli Serdang		
Kab. Humbang Hasudutan		
Kab. Karo	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Labuhan Batu		
Kab. Labuhan Batu Selatan		
Kab. Labuhan Batu Utara	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Langkat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Mandailing Natal		
Kab. Nias	Belum Terinformasi	Belum Terinformasi
Kab. Nias Barat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias Selatan	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Nias Utara	Peduli	Terinformasikan
Kab. Padang Lawas		
Kab. Padang Lawas utara	Paham	Terinformasikan
Kab. Pakpak Bharat	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Samosir	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Serdang Bedagai	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Simalungun	Peduli	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Selatan	Paham	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Tengah	Terhubung	Terinformasikan
Kab. Tapanuli Utara		
Kab. Toba	Terhubung	Terinformasikan
Kota Binjai		
Kota Gunungsitoli		
Kota Medan		
Kota Padang Sidempuan	Terhubung	Terinformasikan
Kota Pematangsiantar	Terhubung	Terinformasikan
Kota Sibolga	Peduli	Terinformasikan
Kota Tanjung Balai	Peduli	Terinformasikan
Kota Tebing Tinggi	Terhubung	Terinformasikan

3.7. Mitra Pembangunan

Mitra Pembangunan adalah salah satu strategi pelibatan masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan dan program Kemendikbudristek. Mitra Pembangunan bisa dari unsur lembaga, organisasi, dunia usaha, maupun dunia industri yang memiliki pendanaan mandiri (*self-funding*) serta ketertarikan dan komitmen dalam berkontribusi di bidang pendidikan.

Di Sumatera Utara telah ada 7 mitra pembangunan *existing* yang telah berjalan dan bekerjasama dengan pemerintah atau pemerintah daerah. Daftarnya sebagai berikut:

1. Dompot Dhuafa Medan
2. Yayasan Gugah Nurani Indonesia
3. Yayasan Djalaludin Pane
4. Tanoto Foundation
5. Yayasan Guru Belajar
6. PT Orbit Ventura Indonesia
7. Sampurna Foundation

Dalam hal ini juga menginisiasi lebih banyak mitra pembangunan yang bergabung. Untuk itu melalui BPMP mengadakan *open house* dan menghadirkan juga calon- calon mitra pembangunan diantaranya:

- a. PT Indosat Ooredoo Hutchison Medan
- b. Wilmar Group
- c. Asian Agri
- d. Marclan Indonesia
- e. Yayasan Don Bosco Medan
- f. PT Bank Raya Digital KC Medan
- g. PT Acer Indonesia
- h. DPW Muhammadiyah Sumatera Utara
- i. DPW Al-Washliyah Sumatera Utara
- j. PT Pelabuhan Indonesia (PELINDO)

Hingga Desember 2022 baru PELINDO yang mendaftarkan diri sebagai mitra. Mitra lain hanya belum didekati lebih intensif. Ke depan perlu dibangun komunikasi yang lebih intens kepada para calon agar bersedia merapat dan menjadi mitra pembangunan yang kontributif. Juga lebih banyak menjaring calon-calon mitra baru di Sumatera Utara

Periode tahun 2023, pola kemitraan difokuskan pada memfasilitasi kerjasama antara mitra pembangunan dengan pemerintah daerah. Dalam rentang masa tahun 2023 ini telah terjalin kemitraan antara mitra pembangunan dengan pemerintah daerah di Sumut, diantara mitra pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT Agincourt Resource Batang Toru
2. CV. Anugerah Bersama Cahaya
3. Forum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo)
4. Yayasan Pendidikan Parulian
5. Forum PKBM Sumatera Utara
6. Majelis Pendidikan Dasar Menengah Muhammadiyah Sumut
7. PT Bank Sumut
8. PTPN IV

3.8. Membangun Komitmen Daerah

Komitmen Daerah dalam mendukung program prioritas termasuk perencanaan dan penganggaran program dukungan. Bentuk dukungan lainnya juga diwujudkan dengan menerbitkan peraturan daerah dalam berbagai bentuk.

Hingga saat ini sudah terbit regulasi berupa Perbup/Perwal dan regulasi yang lebih teknis berupa SE atau SK yang dikeluarkan Pemda atau Dinas Pendidikan yang tercatat sejumlah 215 dokumen dari 33 kab/kota dan provinsi.

Tabel 3.15 Regulasi daerah yang diterbitkan sebagai dukungan terhadap Merdeka Belajar :

NO	Kab Kota	Jml Perda/ Perwal/ Perbup	SE	SK	Jumlah
1	Kab. Labuhan Batu Utara	4	8	6	18
2	Kab. Deli Serdang	4	5	3	12
3	Kab. Tapanuli Selatan	2	7	6	15
4	Provinsi Sumatera Utara	2	3	5	10
5	Kab. Humbahas	2	4	3	9
6	Kota Sibolga	2	1	6	9
17	Kab. Serdang Bedagai	2	3	4	9
7	Kab. Batubara	2	1	2	5
8	Kab. Tapanuli Tengah	1	7	5	13
9	Kab. Langkat	1	7	4	12
10	Kota Pematangsiantar	1	4	5	10
11	Kab. Padang Lawas Utara	1	3	5	9
12	Kab. Labuhan Batu Selatan	1	3	5	9
13	Kab. Asahan	1	2	5	8
14	Kab. Labuhan Batu	1	3	3	7
15	Kab. Dairi	1	3	3	7
16	Kota Medan	1	2	2	5
18	Kota Binjai	1	2		3
19	Kab. Tapanuli Utara		5	3	8
20	Kota Tebing Tinggi		3	4	7
21	Kab. Toba		3	2	5
22	Kab. Karo		1	4	5
23	Kab. Simalungun		3	2	5
24	Kab. Padang Lawas		3	2	5
25	Kab. Mandailing Natal		3	2	5
26	Kota Tanjung Balai		2	2	4
27	Kota Padangsidimpuan		2	2	4
28	Kab. PakPak Bharat		2	1	3
29	Kab. Nias		1		1
30	Kab. Nias Barat		1		1
31	Kab. Nias Selatan		1		1
32	Kab. Nias Utara		1		1
33	Kab. Samosir		1		1
34	Kota Gunungsitoli		1		1
	Jumlah	30	101	96	227

Tabel 3.16 Peraturan daerah yang telah diterbitkan:

NO	Kab Kota	Peraturan Daerah
1	Kab. Asahan	Perbup No.1 Tahun 2023 Tentang PSP dan IKM
2	Kab. Batubara	Perbup No. 99 Tahun 2022 Tentang PSP dan IKM
3	Kab. Dairi	Perda No. 1/2023 ttg Penyelenggaraan PAUD
4	Kab. Delser	Perbup 32_23 Peningkatan mutu pendd melalui Merdeka Belajar
		Perbup No. 25/2021 tentang Perlindungan Disabilitas
		Perda No. 6/2020 ttg Perlindungan Pemenuhan Hak Disabilitas
		Perda No. 5/2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
5	Kab. Humbahas	Perbup No. 19/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif Perbup No. 20/2021 tentang Penyelenggaraan PAUD 1 tahun PRA SD
7	Kab. Labuhan Batu	Perbup No. 24/2023 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan melalui MB
		Perbup No. 33/2022 tentang Penyelenggaraan PAUD HI
8	Kab. Labuhan Batu Selatan	Perbup No. 27/2022 tentang Penyelenggaraan PAUD HI
9	Kab. Labuhan Batu Utara	Perda No. 10-2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
		Perbup No. 35_2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi
		Perbup No. 30_2021 tentang Pedoman PPDB
		Perbup No. 2_2023 tentang Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif
10	Kab. Padang Lawas Utara	Perbup No. 59 tahun 2023 Tentang PSP dan IKM
11	Kab. Serdang Bedagai	Keputusan Bupati No. 46_2023 Pengabungan SD
		Peraturan Bupati No. _2020_PPDB
12	Kab. Tapanuli Selatan	Perbup 16/21 tentang Pengelolaan PAUD HI
		Perbup 17/2021_Penuntasan PAUD 1 tahun
13	Kab. Tapanuli Tengah	Perbup No. 14_2021 tentang PPDB
14	Kota Binjai	Perwal 22/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
15	Kota Medan	Perwal 27_2021 tentang PPDB
16	Kota Pematangsiantar	Perwal No. 12_2021 tentang PPDB
17	Kota Sibolga	Perwal No. 25 Tahun 2023 Tentang PSP, PPGP, dan IKM
18	Provinsi Sumatera Utara	Pergub No. 37 tahun 2022 Tentang Bantuan Operasional Pendidikan
		Keppub tentang PPDB 2023

3.9. Peningkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah

Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila.

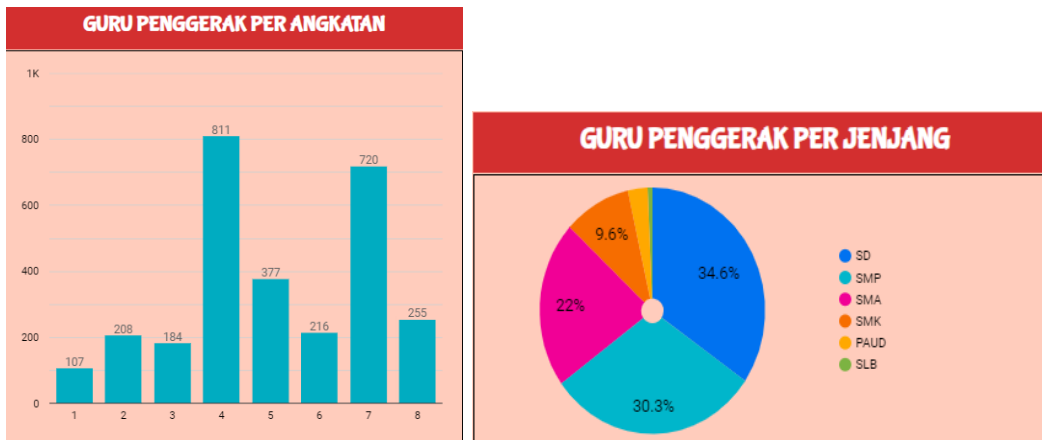
Untuk menjadi Guru Penggerak, guru harus mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Selama mengikuti proses pendidikan, peserta yang lolos seleksi Program Guru Penggerak akan mendapatkan:

- Pendidikan Guru Penggerak selama 6 bulan dan pengembangan kompetensi dalam Lokakarya bersama
- Peningkatan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid
- Pengalaman belajar mandiri dan kelompok terbimbing, terstruktur, dan menyenangkan
- Pengalaman belajar bersama dengan rekan guru lain yang sama-sama lolos seleksi program guru penggerak
- Pengalaman mendapatkan bimbingan/mentoring dari pengajar praktik (pendamping) pendidikan guru

Dukungan Pemda sangat diperlukan untuk mengangkat Guru Penggerak di level yang signifikan dalam melakukan perubahan. Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tersebut, merupakan pengganti Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018. Kepala Sekolah harus memiliki kompetensi dan mampu membawa satuan pendidikan dalam menjalankan program prioritas Merdeka Belajar. Kemendikbudristek ingin dukungan dari Bupati/Walikota terkait program pendidikan Guru Penggerak. Jika ada posisi Kepala Sekolah yang kosong, dapat diisi oleh Guru Penggerak yang berkualitas. Guru yang menjadi lulusan program pendidikan Guru Penggerak siap untuk menjadi Kepala Sekolah dan bisa menggerakkan komunitas sekitarnya.

Saat ini ada 2.878 Guru Penggerak terdaftar telah lulus maupun sedang melaksanakan pendidikan, tersebar di 32 kabupaten/kota di Sumatera Utara kecuali Nias Barat.

Grafik 3.13 Data Guru Penggerak Perangkat dan Perjenjang



Sumber Data : BI SIMPKB Januari 2024

Dinas Pendidikan Kota Medan telah mengangkat 34 Kepala Sekolah dari unsur Guru Penggerak. Hal ini memberi harapan akan ada transformasi pembelajaran di sekolah dimana yang bersangkutan diangkat. Namun kondisi saat ini masih banyak daerah yang belum memberi kepercayaan yang cukup pada Guru Penggerak dan membutuhkan advokasi lebih lanjut.

Dari *dashbord* Pengangkatan Guru Penggerak menjadi Kepala Sekolah, dibagi menjadi 2 yaitu kewenangan Kabupaten/Kota (jenjang TK/PAUD, SD dan SMP) dan kewenangan provinsi (jenjang SMA, SMK dan SLB).

Sekolah Negeri di 33 Kab/kota di Sumatera Utara ada 276 Guru Penggerak yang sudah diangkat menjadi Kepala Sekolah dibanding kebutuhan yaitu 1.159 orang, atau 24%, masih masuk kategori merah. Daerah yang sudah kategori hijau ada 5 yaitu Tebing, Gunung Sitoli, Nias (ketiganya sudah 100%) dan Medan serta Deli Serdang. Kelima daerah ini dianggap cukup responsif dalam menindaklanjuti Permendikbud No. 40 tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, dimana Guru Penggerak menjadi solusi akan kekurangan Kepala Sekolah yang memenuhi syarat.

Untuk jenjang sesuai kewenangan provinsi (SMA, SMK, SLB) di Sumatera Utara 51% Guru Penggerak telah diangkat menjadi Kepala Sekolah sesuai kebutuhan daerah. Tepatnya 63 orang Guru Penggerak telah diangkat menjadi Kepala Sekolah, dari kebutuhan pengisian Kepala Sekolah berjumlah 79 orang. Kebutuhan ini diambil dari data Kepala Sekolah yang pensiun atau masih Plt.

Secara nasional untuk jenjang ini sudah 51% Guru Penggerak yang diangkat menjadi Kepala Sekolah, dimana Sumatera Utara masuk kategori Hijau bersama 12 provinsi lainnya. Bali dan Jawa Tengah memiliki prosentase tertinggi.

Informasi dari lapangan menunjukkan bahwa sebagian Guru Penggerak tidak bersedia menjadi Kepala Sekolah dan bahkan sebagian menginginkan langsung menjadi Pengawas. Hal ini dikarenakan sebagai Kepala Sekolah memiliki tanggungjawab lebih besar mengelola sekolah dan guru-guru serta siswa di dalamnya. Selain itu juga mengelola anggaran dana BOS.

Terkait hal ini merupakan kewenangan daerah bersikap. Yang penting bahwa kekosongan jabatan Kepala Sekolah harus diisi dan Guru Penggerak merupakan salah satu komponen yang memenuhi syarat secara legal formal dan mendapat dukungan penuh pusat. Namun daerah bisa bersikap sesuai kebutuhan, misalnya yang dilakukan oleh Kota Medan adalah melakukan seleksi dari Guru Penggerak yang ada dan dipilih yang paling berkompeten.

A.2. Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, dimana pada tahun 2022 mendapatkan nilai 78,05 dan meningkat di tahun 2023 menjadi 84,05 dengan predikat A. Selain itu peningkatan tata kelola juga ditandai dengan tercapainya target nilai kinerja anggaran (NKA) dari target sebesar 84, didapat realisasi sebesar 94,49.

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Definisi :

Predikat penilaian yang dapat menggambarkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

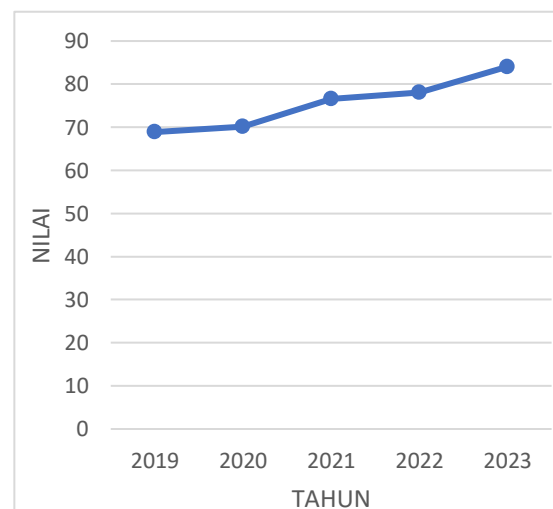
Metode Penghitungan :

$$= (30\% \times \text{Nilai Perencanaan Kinerja}) + (30\% \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (15\% \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (25\% \times \text{Nilai Evaluasi Kinerja})$$

Tabel 3.17.
Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1

Tahun 2022	Tahun 2023					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
BB	A	A	-	-	-	A	-

Grafik 3.14. Capaian Peringkat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara



Program dan Kegiatan Pendukung

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 2.1 ini antara lain:

1. Menindaklanjuti laporan hasil evaluasi (LHE) SAKIP tahun 2022;
2. Kegiatan asistensi penguatan pelaksanaan SAKIP tanggal 9 Maret 2023;
3. Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Diklat SAKIP yang dilaksanakan Pusdiklat;
4. Melaksanakan tahapan-tahapan implementasi SAKIP.

Indikator Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Definisi :

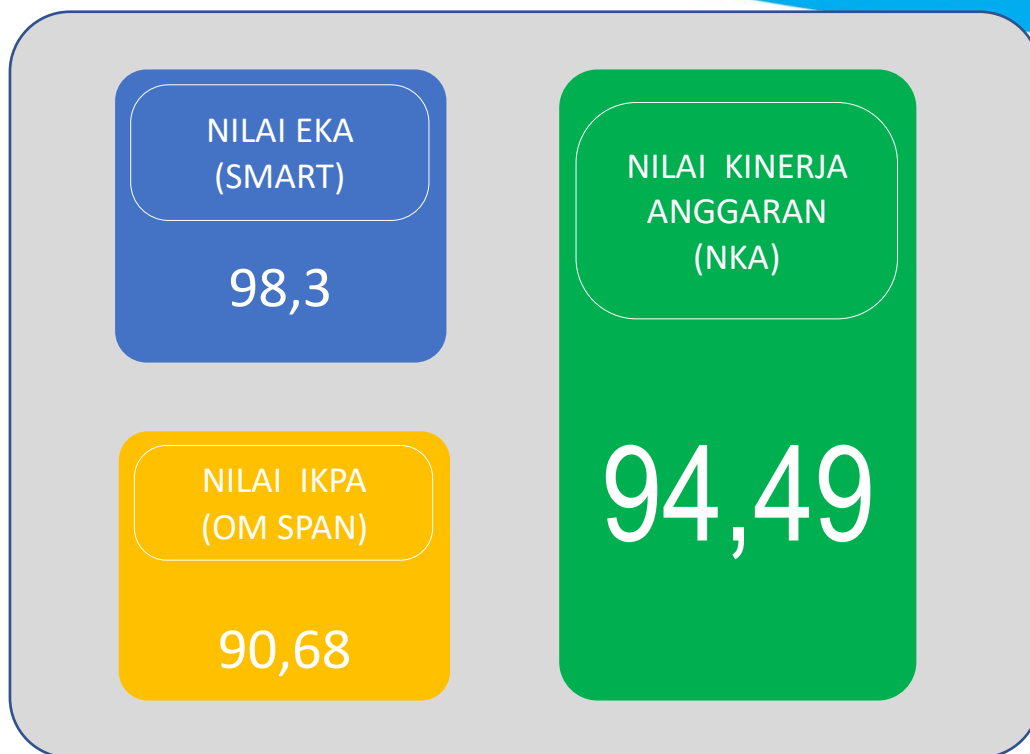
- a. Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian/lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran;
- b. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja kementerian/lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi;
- c. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis atas kinerja anggaran dengan mengukur variabel-variabel capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Metode Penghitungan :

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (50 \% \times \text{EKA}) + (50 \% \times \text{IKPA})$$

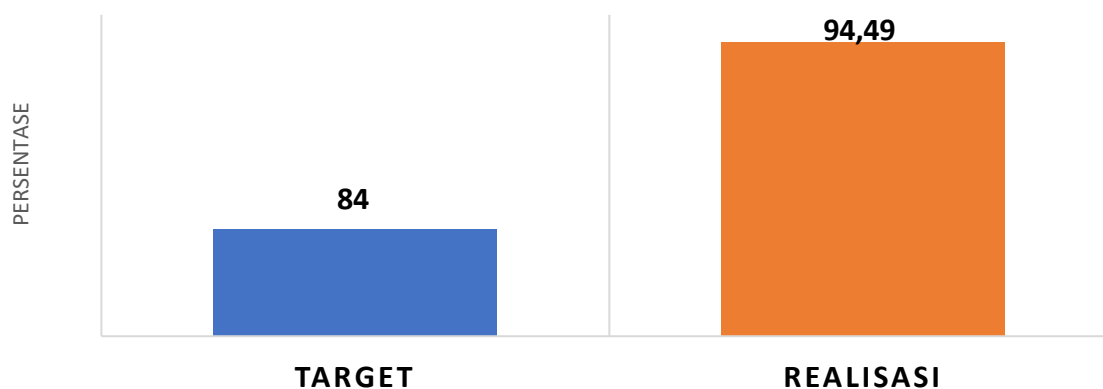
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Anggaran

Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja BPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
97,67	84	94,49	112,49%	-	-	85	111,16%



Gambar 3.15. Capaian IKK.2.2

Grafik 3.15. Capaian Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara



Berdasarkan penilaian dari Kementerian Keuangan yang terhubung melalui aplikasi Spasikita dari Kemendikbudristek, nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L untuk tahun 2023 sebesar 94,49. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa target untuk IKK.2.2 telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 84 tercapai realisasi 94,49, dengan persentase capaian sebesar 112,49%. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar 94,49 diperoleh dari akumulasi nilai EKA sebesar 98,3 dan nilai IKPA sebesar 90,68.

Program dan Kegiatan Pendukung

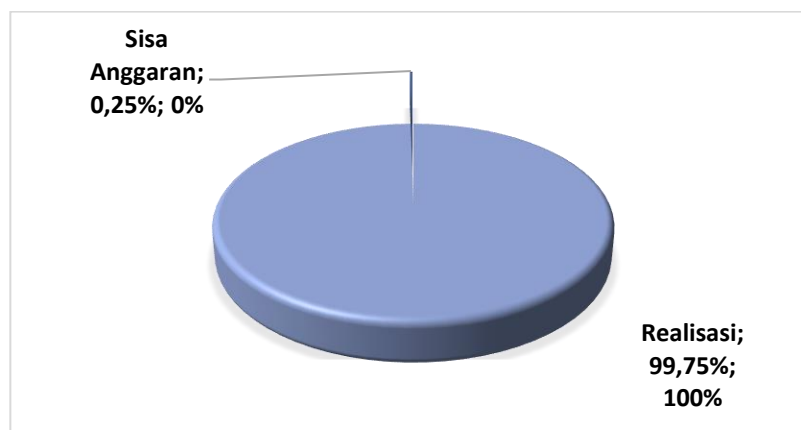
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 dalam upaya mendukung pencapaian target IKK. 2.2 ini antara lain:

1. Membentuk Tim Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk melaksanakan pengendalian atas laporan keuangan;
2. Rapat evaluasi rutin pencapaian kinerja anggaran;
3. Membuat peta risiko atas pelaksanaan anggaran;
4. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
5. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang dilaksanakan setiap bulan;
6. Menyampaikan laporan capaian *output* pada aplikasi SAKTI tepat waktu.

B. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran

Grafik 3.16. Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023



Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 48.375.152.000,-	Rp 48.254.503.464,-	99,75%

Pagu anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dalam DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 48.375.152.000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 48.254.503.464,- dengan persentase daya serap sebesar 99.75%.

2. Efisiensi Anggaran

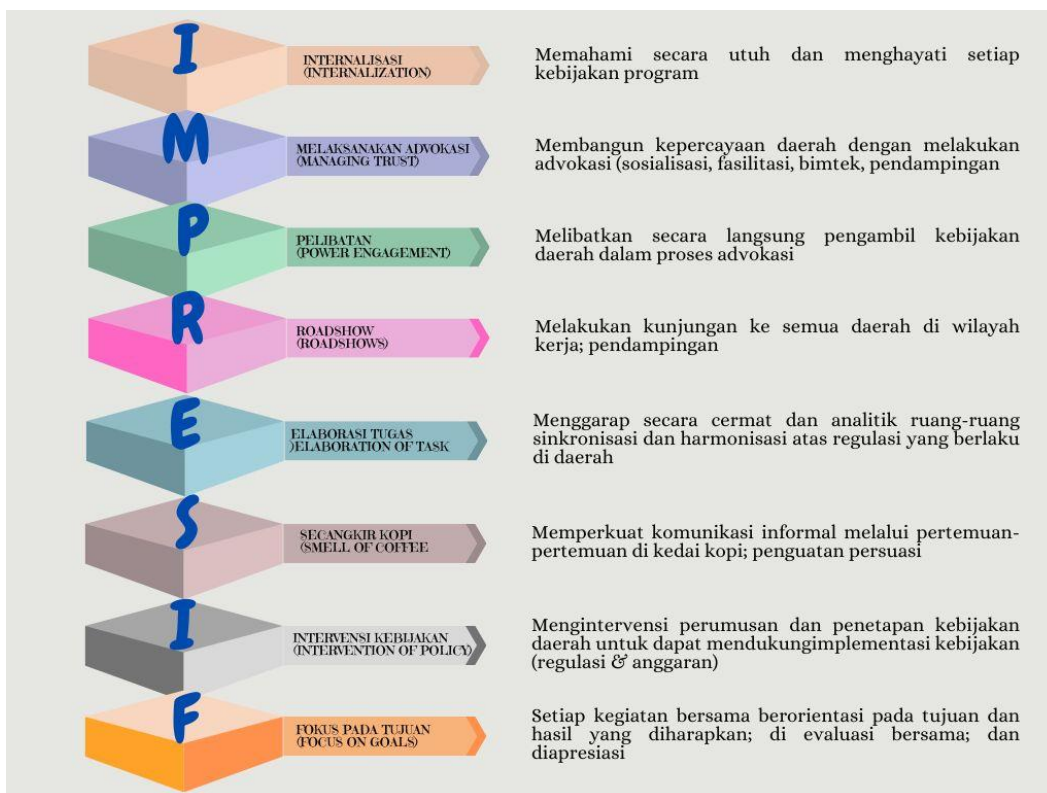
Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah berupaya melakukan efisiensi anggaran. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pokja Manajemen Operasional (PMO), dimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi dan advokasi dapat digabungkan menjadi satu dalam kegiatan PMO.

Hasil efisiensi tersebut digunakan/dioptimalisasikan kembali untuk memperbanyak volume output dari kegiatan yang lebih prioritas dan untuk kegiatan yang sifatnya merupakan instruksi dari Kemendikbudristek yang harus segera diselesaikan misalnya kegiatan pendataan dan pemanfaatan Chromebook.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Cross Cutting/Collaborative*

1. Inovasi

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan inovasi sebagai berikut:



Gambar 3.3. Inovasi Pelaksanaan Advokasi

Strategi advokasi melalui pendekatan ”IMPRESIF” diterapkan sebagai model pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota/Provinsi.

2. Penghargaan

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan penghargaan :



- Hasil advokasi di Kabupaten Nias Selatan mendapatkan Penghargaan sebagai Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023
- Hasil advokasi di Kabupaten Labuhanbatu mendapatkan Penghargaan sebagai Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023
- Hasil advokasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapatkan Penghargaan sebagai Bunda PAUD Tingkat Nasional Tahun 2023
- Peringkat ke IV Pengelolaan Barang Milik Negara di Tahun 2022
- Penghargaan atas pencapaian terbaik dalam Apresiasi Duta Merdeka Belajar
- Penghargaan atas keberhasilan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2023 berdasarkan penilaian Tim Penilai Internal
- Penghargaan atas keberhasilan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi tahun 2023 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

3. Program *Cross Cutting/Collaborative*

Pada tahun 2023, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melakukan program *Crosscutting/Collaborative* berupa penguatan peran PMO dengan melibatkan Unit Pelaksana Teknis di Provinsi Sumatera Utara yaitu Balai Besar Guru Penggerak (BBGP) Provinsi Sumatera Utara dan Balai Besar Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Bangunan dan Listrik (BBPPMPV BBL) Provinsi Sumatera Utara.

Pelaksanaan PMO juga tidak hanya melibatkan Dinas Pendidikan saja melainkan lintas sektoral seperti Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah untuk mendorong implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten/Kota.

Adapun peran masing-masing pihak adalah :

- a. Peran BPMP Provinsi Sumatera Utara :
 - Melaksanakan advokasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
 - Memfasilitasi pelaksanaan PMO di Kabupaten/Kota
 - Penyampaian informasi terkait progress pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar
- b. Peran BBGP Provinsi Sumatera Utara :
 - Melaksanakan advokasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka dan Program Pendidikan Guru Penggerak ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- c. Peran BBPPMPV BBL Provinsi Sumatera Utara :
 - Melaksanakan advokasi terkait Implementasi Kurikulum Merdeka Jenjang SMK ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi;
- d. Peran Dinas Kesehatan :
 - Mendorong program gerakan sekolah sehat di satuan pendidikan;
- e. Peran Bappeda :
 - Mendorong pemenuhan Indikator Kinerja Urusan bidang pendidikan di Kabupaten/Kota

BAB IV

PENUTUP

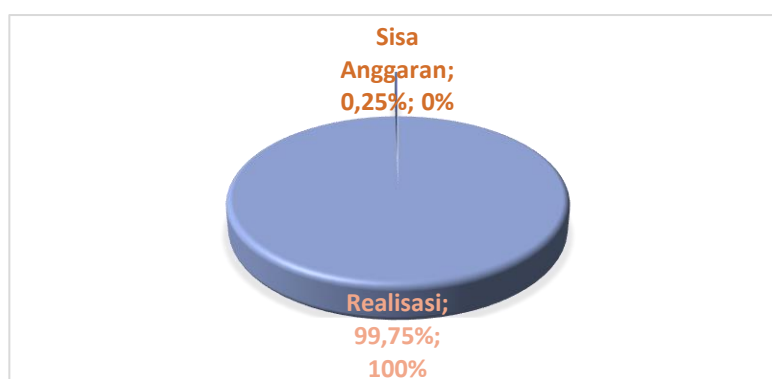
Kesimpulan Umum Laporan Kinerja

Selama tahun 2023, BPMP Provinsi Sumatera Utara berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Rerata capaian sebesar 114,41% .dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19 Target, Realisasi dan Capaian kegiatan BPMP Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.1 Persentase satuan pendidikan (PAUD, Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1,98%	1,36%	68,69%
1.2 Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30%	52,94%	176,47%
2.1 Predikat SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara	A	A	100%
2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL	84	94,49%	112,49%
		Rerata Capaian	114,41%

Grafik 4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023



Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 48.375.152.000,-	Rp 48.254.503.464,-	99,75%

Secara garis besar, dari 4 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, terdapat 1 indikator kinerja yang belum tercapai secara optimal yaitu “ Persentase Satuan Pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya”. Sementara 3 indikator kinerja lainnya berhasil memenuhi target. Capaian kinerja BPMP Provinsi Sumatera Utara turut didukung oleh kinerja keuangan di tahun 2023 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 48.254.503.464,- atau 99,75% dari total pagu sebesar Rp. 48.375.152.000,-.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

- 1 Perencanaan Berbasis Data (PBD) di satuan pendidikan belum terlaksana dengan baik akibat sosialisasi yang belum mencukupi hingga menjangkau satuan pendidikan. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang sudah disusun untuk tahun 2023 masih belum maksimal mendukung program prioritas. Baik dalam bentuk kesesuaian indikator urusan (IKUR), kesesuaian kegiatan maupun ketercukupan anggaran. Intinya masih belum banyak rencana dukungan pelaksanaan merdeka belajar;
- 2 Kemampuan pegawai BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan. Sebagai sebuah tupoksi baru hal ini bisa dipahami namun perlu diupayakan peningkatan kompetensi pegawai secara menyeluruh.
- 3 Pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya PSP, IKM dan PBD di daerah sasaran sebagian menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan, namun masih ada kesenjangan yang tinggi antar daerah di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh dukungan Pemerintah Daerah yang masih belum maksimal;
- 4 Sebagian daerah menunjukkan ketertinggalan yang terus menerus Adapun akar masalah yang menjadi penyebabnya adalah pemahaman yang belum mencukupi dan kekurangberdayaan para pengambil kebijakan strategis baik di Pemerintah Daerah khususnya di Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kurikulum merdeka;
- 5 Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak juga belum sepenuhnya efektif menjangkau sasaran dan membutuhkan waktu lebih panjang dan strategi yang lebih baik;
- 6 Pokja atau PMO masih banyak yang belum berkemampuan mencukupi untuk melakukan eksekusi di perencanaan dan pelaksanaan. Sebagian bahkan menunjukkan penurunan perhatian terhadap rapat-rapat yang diadakan secara rutin;
- 7 Pokja atau PMO Daerah kurang memiliki perangkat yang bisa langsung mendukung dan mendampingi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Untuk memastikan perbaikan pencapaian di tahun 2024, BPMP Provinsi Sumatera Utara akan melakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Perlunya BPMP mengembangkan cara baru sosialisasi ke daerah hingga ke satuan pendidikan. Salah satunya adalah webinar. Dengan jaringan BPMP yang sudah terbangun hingga ke Dinas Pendidikan setiap kabupaten/kota dan sekolah penggerak (jaringan BBGP) serta komunitas yang ada, maka hal ini bisa mempercepat transformasi pendidikan di daerah;
2. Perlu adanya penilaian pelayanan advokasi BPMP di daerah, apakah sudah optimal atau belum;
3. Perlunya sinkronisasi kerja BPMP dengan BBGP khususnya dalam melakukan pendampingan di daerah. Untuk itu komunikasi dan koordinasi perlu dibangun baik di tingkat Kepala, sesama Pokja, hingga di tingkat sesama koordinator daerah;
4. Perlunya dibuat permodelan di daerah, baik di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat Pemda, yang bisa menjadi contoh bagi satuan pendidikan atau daerah lain yang membutuhkan;
5. Perlunya peningkatan kapasitas staf BPMP yang lebih kontiniu dan terprogram dalam pendampingan dan advokasi di daerah;
6. Perlunya mewujudkan UPT sebagai sekolah dengan membuat jadwal yang lebih sering, rutin dan bottom up (misal ditetapkan 2 minggu sekali setiap hari Jumat). Ini melengkapi IHT yang sudah berjalan dalam kelas besar dan top down;
7. Perlunya menyusun *pemetaan kemampuan daerah* dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Koordinator daerah dapat menyusun pemetaan dengan cara-cara yang sederhana namun mampu mendapatkan gambaran yang utuh dan faktual. Khususnya memetakan daerah yang paling kurang berkemampuan sehingga bisa didalami dan menemukan strategi menguatkannya;
8. Perlunya rapat-rapat sebelum dan setelah kegiatan yang strategis (misal kegiatan FGD, rapat PMO atau sosialisasi di daerah). Rapat sebelum kegiatan diperlukan agar desain dan efektifitas kegiatan dapat maksimal. Rapat setelah kegiatan diperlukan ;
9. Mendapatkan evaluasi/refleksi terhadap kelebihan dan kekurangannya untuk perbaikan tahap selanjutnya;

10. Perlunya rapat berkala tim strategis BPMP (Kepala , Pokja, Widyaprada) untuk membahas hasil pemetaan dan temuan di lapangan agar segera mendapatkan tindaklanjut yang tepat;
11. Sebagai perpanjangan tangan PMO daerah, sebaiknya daerah membentuk semacam Tim Pengembang Merdeka Belajar yang bisa secara langsung melakukan sosialisasi, pelatihan dan bahkan monitoring berkala ke sekolah. Unsur-unsur yang penting dilibatkan adalah pengawas, Kepala Sekolah/Guru pelaksana PSP, perwakilan K3S/MKKS dan juga perwakilan KKG/MGMP atau Guru Penggerak, serta penggerak komunitas di daerah. SK dapat dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan atau bahkan Bupati/Walikota. Dan dukungan anggaran dari APBD atau sumber dana lainnya sangat menentukan dapat berjalan.
12. Komunikasi dan koordinasi semua koordinator, Pokja, Widyaprada dan Tim Teknis perlu diperkuat lagi agar kegiatan advokasi ke daerah bisa lebih optimal pelaksanaannya, tindaklanjutnya jelas, terukur, dan siap mendampingi daerah.
13. Perlunya sinergi advokasi di daerah yang dilakukan sesama pegawai BPMP. Ada komunikasi atau pemberitahuan kepada koordinator kab/kota bila ada yang akan ke daerah.
14. Perlunya BPMP membangun tim khusus yang membantu advokasi daerah yang mengalami pelambatan atau yang membutuhkan bantuan, bisa penugasan dari Pokja yang sudah ada.

LAMPIRAN



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Medan, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,



Iwan Syahril

Drs. Irwan Safii, M.Pd

Target Kinerja

#	Sasaran/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	1.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	30
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	84

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 26.369.731.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 22.005.421.000
		TOTAL	Rp. 48.375.152.000

Medan, 18 Desember 2023

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,



Iwan Syahril

Drs. Irwan Safii, M.Pd



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	1.98	TW4 : 1,98	TW4 : 1,36
2	[SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	30	TW4 : 30	TW4 : 52,94
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	A	TW4 : A	TW4 : A
3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	[[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	84	TW4 : 84	TW4 : 94,49

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.48.375.152.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 48.254.503.464** atau **99,75%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 120.648.536**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Progress / Kegiatan :

Terdapat Rincian Output (RO) 6397.QDB.850 yaitu Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutu pendidikannya. Target capaian output adalah 8778 lembaga, dan sampai akhir Desember 2023 yang sudah terfasilitasi adalah 10.480 lembaga. Kegiatan yang telah dilakukan dalam priode Oktober s.d Desember 2023 dalam upaya mendukung capaian IKK 1.1. adalah sebagai berikut

Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Kombel Antar Sekolah Penguatan Literasi

Pendampingan Satuan Pendidikan dalam Pelaksanaan Gladi Bersih AN Jenjang SD Sederajat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AN Jenjang SD Sederajat

Monitoring dan Evaluasi pada 40 Satuan Pendidikan Piloting GSS

Pemantauan Tindak Lanjut PBD Satuan Pendidikan

Pendampingan Pemanfaatan Chromebook dan Aktivasi Akun Belajar.id pada Satuan Pendidikan

Pendampingan dan Fasilitasi Praktik Baik Guru Sekolah Penggerak

Pendampingan Pemanfaatan Chromebook dan Aktivasi Akun Belajar.id pada Satuan Pendidikan

Advokasi Percepatan Penyaluran Dana BOSP Tahap 2 Tahun 2023

Pemantauan Tindak Lanjut PBD Satuan Pendidikan

Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan peralatan TIK

Pendampingan Pemanfaatan Chromebook dan Aktivasi Akun Belajar.id pada Satuan Pendidikan.

Kendala / Permasalahan :

1. Perencanaan berbasis data (PBD) juga belum terlaksana dengan baik akibat sosialisasi yang belum mencukupi hingga menjangkau satuan Pendidikan. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang sudah disusun untuk tahun 2023 masih belum maksimal mendukung program prioritas ini. Baik dalam bentuk kesesuaian indikator urusan (IKUR), kesesuaian kegiatan maupun ketercukupan anggaran. Intinya masih belum banyak rencana dukungan pelaksanaan merdeka belajar

2. Kemampuan staf BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan. Sebagai sebuah tupoksi baru hal ini bisa dipahami namun perlu diupayakan secara masif.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Perlunya BPMP mengembangkan cara baru sosialisasi ke daerah hingga ke satuan pendidikan. Salah satunya adalah webinar. Dengan jaringan BPMP yang sudah terbangun hingga ke Dinas Pendidikan setiap kabupaten/kota dan sekolah penggerak (jaringan

- BBGP) serta komunitas yang ada, maka hal ini bisa mempercepat transformasi pendidikan di daerah
2. Perlu adanya penilaian pelayanan advokasi BPMP di daerah, apakah sudah optimal atau belum. Konsultan bisa diminta mengembangkan instrumen kepuasan pelanggan tersebut. Ini akan menjadi masukan perbaikan strategi ke depan
 3. Perlunya sinkronisasi kerja BPMP dengan BBGP khususnya dalam melakukan pendampingan di daerah. Untuk itu komunikasi dan koordinasi perlu dibangun baik di tingkat Kepala, sesama Pokja, hingga di tingkat sesama koordinator daerah
 4. Perlunya dibuat permodelan di daerah, baik di tingkat satuan pendidikan atau di tingkat Pemda, yang bisa menjadi contoh bagi satuan pendidikan atau daerah lain yang membutuhkan
 5. Perlunya peningkatan kapasitas staf BPMP yang lebih kontinyu dan terprogram dalam pendampingan dan advokasi di daerah
 6. Perlunya mewujudkan UPT sebagai sekolah dengan membuat jadwal yang lebih sering, rutin dan bottom up (misal ditetapkan 2 minggu sekali setiap hari Jumat). Ini melengkapi IHT yang sudah berjalan dalam kelas besar dan top down
 7. Transparansi di BPMP sudah semakin membaik, namun ke depan transparansi perlu digalakkan dan disuarakan lagi secara bersama-sama oleh semua pegawai BPMP.

B . SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

- IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Progress / Kegiatan :

Terdapat Rincian Output (RO) 6397.QDB.750 yaitu Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutu pendidikannya. Target capaian output adalah 13627 lembaga, dan sampai akhir Desember 2023 yang sudah terfasilitasi adalah 15400 lembaga. Kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian kinerja IKK 1.2 antara lain

- Monitoring dan Evaluasi Pendampingan Penguatan 6 Strategi IKM
- Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendampingi satuan pendidikan untuk mendaftar sebagai sasaran IKM di sekolah di wilayahnya
- Pendampingan Kombel Antar Sekolah Penguatan Literasi
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sulingjar Jenjang PAUD
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AN Kesetaraan PAKET A
- Pendampingan Posko AN Tingkat Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AN Kesetaraan PAKET B
- Pendampingan Pengisian Dapodik Di Daerah
- Pendampingan Program Kampus Mengajar
- Monitoring dan Evaluasi Implementasi PBD
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan AN Jenjang SMP
- Pelaksanaan PMO bulan Oktober dan November
- Sinkronisasi Perencanaan Berbasis Data
- Pendampingan dan Advokasi Analisis Rapor Pendidikan dan PBD di Prov/Kab/Kota
- Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Bagi Guru dan Kepala Sekolah SD Angkatan 1,2,3 dan 4. Rakor Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
- Rakor Refleksi Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar
- Bimtek Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Bagi Guru dan Kepala Sekolah SD Angkatan 5
- Pendampingan Pemanfaatan Chromebook DAK TIK pada Satuan Pendidikan
- Rakor Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kab./Kota
- Rapat Koordinasi Penyusunan Strategi Peningkatan Skor Rapor Program Sekolah Penggerak
- Bimtek Peningkatan Kemampuan Literasi Sekolah Penggerak PSP 1 dan PSP 2
- Refleksi Intervensi Program Pemulihan dan Transformasi Pembelajaran Melalui Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu
- Melakukan advokasi kepada Pemda untuk memfasilitasi sekolah-sekolah penerima chromebook.

Kendala / Permasalahan :

1. Pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya PSP, IKM dan PBD di daerah sasaran sebagian menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun masih ada kesenjangan yang tinggi antar daerah di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh dukungan sebagian daerah yang masih belum maksimal. Sebagian daerah menunjukkan ketertinggalan yang terus menerus
2. Adapun akar masalah yang menjadi penyebabnya adalah pemahaman yang belum mencukupi dan kekurangberdayaan para pengambil kebijakan strategis baik di Pemerintah daerah terkhusus di Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan kurikulum merdeka
3. Sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak juga belum sepenuhnya efektif menjangkau sasaran dan membutuhkan waktu lebih panjang dan strategi yang lebih baik
4. Pokja atau PMO masih banyak yang belum berkemampuan mencukupi untuk melakukan eksekusi di perencanaan dan pelaksanaan. Sebagian bahkan menunjukkan penurunan perhatian terhadap rapat-rapat yang diadakan secara rutin
5. Pokja atau PMO Daerah kurang memiliki perangkat yang bisa langsung mendukung dan mendampingi satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Perlunya menyusun pemetaan kemampuan daerah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Koordinator daerah dapat menyusun pemetaan dengan cara-cara yang sederhana namun mampu mendapatkan gambaran yang utuh dan faktual. Khususnya memetakan daerah yang paling kurang berkemampuan sehingga bisa didalami dan menemukan strategi menguatkannya
2. Perlunya rapat-rapat sebelum dan setelah kegiatan yang strategis (misal kegiatan FGD, rapat PMO atau sosialisasi di daerah). Rapat sebelum kegiatan diperlukan agar desain dan efektifitas kegiatan dapat maksimal. Rapat setelah kegiatan diperlukan
3. untuk mendapatkan evaluasi/refleksi terhadap kelebihan dan kekurangannya untuk perbaikan tahap selanjutnya
4. Perlunya rapat berkala tim strategis BPMP (kepala, pokja, WP) untuk membahas hasil pemetaan dan temuan di lapangan agar segera mendapatkan tindak lanjut yang tepat
5. Sebagai perpanjangan tangan PMO daerah, perlu kiranya Daerah membentuk semacam Tim Pengembang Merdeka Belajar (atau apapun namanya) yang bisa secara langsung melakukan sosialisasi, pelatihan dan bahkan monitoring berkala ke sekolah. Unsur-unsur yang penting dilibatkan adalah pengawas, Kepala Sekolah/Guru pelaksana PSP, perwakilan K3S/MKKS dan juga perwakilan KKG/MGMP atau Guru Penggerak, serta penggerak komunitas di daerah. SK bisa dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan atau bahkan Bupati/Walikota. Dan dukungan anggaran dari APBD atau sumberdana organik lainnya sangat menentukan mereka bisa berjalan. 6. Komunikasi dan

koordinasi semua koordinator, Pokja, WP dan Tim Teknis perlu diperkuat lagi agar kegiatan advokasi ke daerah bisa lebih optimal pelaksanaannya, tindaklanjutnya jelas, terukur, dan siap mendampingi daerah. 7. Perlunya sinergi advokasi di daerah yang dilakukan sesama pegawai BPMP. Minimal ada komunikasi atau pemberitahuan kepada koordinator kab/kota bila ada yang akan ke daerah. 8. Perlunya BPMP membangun tim khusus yang membantu advokasi daerah yang mengalami pelambatan atau yang membutuhkan bantuan, bisa penugasan dari Pokja yang sudah ada.

C . SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

- IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress / Kegiatan :

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara = 84,05 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja.

Kendala / Permasalahan :

1. Tim SAKIP yang telah dibentuk belum seluruhnya bekerja secara optimal, hanya beberapa orang yang aktif
2. Implementasi SAKIP masih harus diperkuat dengan melakukan usaha peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Pembentukan tim SAKIP yang solid dan berkomitmen dalam pelaksanaan tugas
2. Menjadwalkan program peningkatan kompetensi bagi tim SAKIP dan petugas yang menangani perencanaan termasuk operator aplikasi spasikita dan SAKTI.

D . SK 2.0 Meningkatkan tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

- IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara

Progress / Kegiatan :

Nilai IKPA di bulan Desember tahun 2023 = 90,68. Sementara nilai EKA = 98,3

Sehingga NKA = 50% (90,68) + 50% (98,3) = 94,49

Daya serap anggaran = 99,75%.

Kendala / Permasalahan :

1. Terdapat indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 80 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 56,67
2. Terdapat indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai di bawah 90 yaitu Indikator penyerapan anggaran dengan nilai 82,45 dan belanja kontraktual dengan nilai 86,81.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Perlu peningkatan kualitas perencanaan anggaran, dengan melakukan pemantauan secara berkala oleh tim evaluasi
2. Perlu peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan usaha peningkatan kompetensi bagi SDM yang terkait.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Peningkatan kompetensi staf BPMP dalam mengadvokasi daerah akan terus ditingkatkan. Untuk itu akan dilakukan langkah-langkah antara lain
 - a. Pembentukan komunitas belajar di setiap unit kerja, baik itu di tim kerja maupun di sub bagian umum
 - b. Setiap hari senin akan dilakukan belajar bersama terkait kebijakan merdeka belajar yang diikuti oleh semua pegawai dengan narasumber dari setiap tim kerja
2. Selanjutnya akan dilakukan rapat berkala tim strategis BPMP (kepala, pokja, WP) untuk membahas hasil pemetaan dan temuan di lapangan agar segera mendapatkan tindaklanjut yang tepat
3. Implementasi SAKIP agar terus dijalankan dan dijadwalkan tahapannya seperti pengukuran dan evaluasi kinerja
4. Terkait dengan nilai kinerja anggaran masih harus ditingkatkan, untuk itu akan ditambah personil di bagian keuangan dan akan dibentuk tim satgas yang menangani perencanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Medan, 17 Januari 2024

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara



Drs. Irwan Safii, M.Pd



**REVIU RENSTRA / EVALUASI KINERJA
BPMP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2023**

1. Capaian target renstra sampai dengan tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024	
				Target Renstra	Target PK	Realisasi	Target Renstra	Proyeksi Target PK
1	SK 1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	%	3.92	1.98	1.36	3.92	3.92
2		IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	%	35.00	30	52.94	35.00	52.95
3	SK 2.0 Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Predikat	-	A	A	-	A
4		IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara	Nilai	-	84	94.49	-	94.50

a) Evaluasi dan Analisis Kinerja

Capaian kinerja tujuan strategis BPMP Provinsi Sumatera Utara diakhir tahun 2023 masih ada yang belum mencapai target yaitu indikator IKK 1.1 "Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya" realisasi PK tahun 2023 adalah 1.36% dari target sebesar 1.98% sehingga capaian kinerja hanya mencapai 68,69%, tetapi untuk indikator lainnya telah mencapai bahkan melampaui target PK tahun 2023 yaitu indikator IKK 1.2 "Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)" realisasi sebesar 52, 94% dibandingkan dengan target sebesar 30% maka capaian kinerja sebesar 176,47%, untuk indikator IKK 2.1 "Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara" mendapat predikat A dari target PK 2023 predikat A dan untuk indikator IKK 2.2 "Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Utara" capain realisasi sebesar 94,49 dari PK tahun 2023 sebesar 84 dengan demikian capaian kinerja sebesar 112,49%.

b) Penyerapan Anggaran

Pagu Anggaran sebesar **Rp.48.375.152.000** dan Realisasi Anggaran s.d. Desember 2023 sebesar **Rp. 48.254.503.464** atau **99.75%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. Desember 2023 **Rp. 120.648.536**

2. Kendala dan Permasalahan Umum

1. Perencanaan berbasis data (PBD) juga belum terlaksana dengan baik akibat sosialisasi yang belum mencukupi hingga menjangkau satuan Pendidikan. Hal ini mengakibatkan perencanaan yang sudah disusun untuk tahun 2023 masih belum maksimal mendukung program prioritas ini. Baik dalam bentuk kesesuaian indikator urusan (IKUR), kesesuaian kegiatan maupun ketercukupan anggaran. Intinya masih belum banyak rencana dukungan pelaksanaan merdeka belajar 2. Kemampuan staf BPMP dalam mengadvokasi daerah masih beragam dan perlu ditingkatkan. Sebagai sebuah tupoksi baru hal ini bisa dipahami namun perlu diupayakan secara masif. 3. Pelaksanaan kurikulum merdeka khususnya PSP, IKM dan PBD di daerah sasaran sebagian menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. Namun masih ada kesenjangan yang tinggi antar daerah di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan oleh dukungan sebagian daerah yang masih belum maksimal. Sebagian daerah menunjukkan ketertinggalan yang terus menerus 4. Tim SAKIP yang telah dibentuk belum seluruhnya bekerja secara optimal, hanya beberapa orang yang aktif dan Implementasi SAKIP masih harus diperkuat dengan melakukan usaha peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan. 5. Terdapat indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai dibawah 80 yaitu deviasi halaman III DIPA dengan nilai 56,67 dan Terdapat indikator pada IKPA yang mendapatkan nilai di bawah 90 yaitu Indikator penyerapan anggaran dengan nilai 82,45 dan belanja kontraktual dengan nilai 86,81.

3. Rekomendasi / Langkah Kerja ke Depan

1. Telah dibentuk tim SAKIP 2024 dan diharapkan untuk dapat mengawal implementasi SAKIP di BPMP Provinsi Sumatera Utara
2. Target kinerja pada Renstra 2020-2024 telah diubah dan diharapkan tim SAKIP dapat merevisi narasi yang ada di renstra untuk selanjutnya disosialisasikan dan di publis pada website BPMP Provinsi Sumatera Utara. 3. kompetensi staf BPMP dalam mengadvokasi daerah akan terus ditingkatkan. Untuk itu akan dilakukan langkah-langkah antara lain
- c. Pembentukan komunitas belajar di setiap unit kerja, baik itu di tim kerja maupun di sub bagian umum
- d. Setiap hari senin akan dilakukan belajar bersama terkait kebijakan merdeka belajar yang diikuti oleh semua pegawai dengan narasumber dari setiap tim kerja
4. Selanjutnya akan dilakukan rapat berkala tim strategis BPMP (kepala, pokja, WP) untuk membahas hasil pemetaan dan temuan di lapangan agar segera mendapatkan tindak lanjut yang tepat
5. Implementasi SAKIP agar terus dijalankan dan dijadwalkan tahapannya seperti pengukuran dan evaluasi kinerja
6. Terkait dengan nilai kinerja anggaran masih harus ditingkatkan, untuk itu akan ditambah personil di bagian keuangan dan akan dibentuk tim satgas yang menangani perencanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.

Medan, Desember 2023

Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara,



Drs. Irwan Safii, M.Pd

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Bunga Raya No. 96 Asam Kumbang, Pos Sunggal – Medan
Telepon : (061) 8222372 Laman : <https://lpmp-sumut.kemdikbud.go.id>

PERYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini kendalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

BPMP Provinsi Sumatera Utara
27 Januari 2024
Ketua Tim Reviu

Bastian Derajat Pulungan, S.T., M.Si
NIP 197007162003121002